



RAT

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TAHUN 2025

BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alam, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini telah selesai disusun.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kemiskinan beserta dampak yang ditimbulkannya. Selain tetap konsisten menjalankan program penanggulangan yang sudah ada (reguler), Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menjalankan program pengaman sosial dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat miskin, rentan serta masyarakat lainnya.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) disusun berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Dokumen RAT Ini merupakan rencana kerja Pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2025 berisi penjelasan mengenai kondisi kemiskinan Kota Lhokseumawe, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe beserta target program dan anggarannya selama Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Sekretariat TKPK Kota Lhokseumawe serta kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada pada Perangkat Daerah Provinsi Kota Lhokseumawe.

Demikian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan ini. Semoga Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kota Lhokseumawe ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder, pemangku kepentingan dan lintas sektor lainnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Lhokseumawe, 25 Februari 2025

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOXSEUMAWE**



REZA MAHMUD, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat I - IV/b
Nip. 19850516 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN SEBELUMNYA	6
2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe	6
2.2. Kondisi Umum Kemiskinan	7
2.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0).....	7
2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin	8
2.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....	10
2.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	11
2.1.5 Garis Kemiskinan.....	12
2.3. Kinerja dan Evaluasi Bidang Kemiskinan	14
2.3.1 Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	14
2.3.2 Bidang Kesehatan	18
2.3.3 Bidang Pendidikan	23
2.3.4 Bidang Infrastruktur	26
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	32
3.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	32
3.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	37

BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2025.....	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2025	53
4.2 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025	64
BAB V LOKASI PRIORITAS	82
5.1 Hasil Analisis Penentuan Lokasi Prioritas	84
BAB VI PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2024.....	17
Tabel 2.2.	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	23
Tabel 2.3.	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, jenis kelamin KRT, dan sumber penerangan Provinsi Aceh Tahun 2022.....	30
Tabel 3.1.	Matriks Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	39
Tabel 4.1.	Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	56
Tabel 4.2.	Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe tahun 2015-2024.....	2
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Kota Lhokseumawe.....	6
Gambar 2.2.	Presentase Penduduk Miskin (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2024.....	8
Gambar 2.3.	Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2024.....	9
Gambar 2.4.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024.....	10
Gambar 2.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2014-2024.....	11
Gambar 2.6.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2017-2024.....	12
Gambar 2.7.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2024.....	13
Gambar 2.8.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas (%) Tahun 2019-2023.....	14
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota dengan Migas (%) Tahun 2023.....	15
Gambar 2.10.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas (%) Tahun 2019-2023.....	15
Gambar 2.11.	Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tanpa Migas (%) Tahun 2023.....	16
Gambar 2.12.	Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	18

Gambar 2.13.	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024.....	19
Gambar 2.14.	Angka Kematian Ibu Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	19
Gambar 2.15.	Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	20
Gambar 2.16.	Angka Kematian Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	21
Gambar 2.17.	Prevalensi Stunting pada Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 2.18.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 2.19.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	25
Gambar 2.20.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	25
Gambar 2.21.	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2020-2024.....	27
Gambar 2.22.	Presentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	28
Gambar 2.23.	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024.....	29
Gambar 2.24.	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	30
Gambar 4.1.	Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe.....	55
Gambar 5.1.	Presentase Kemiskinan Ekstrem Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	82

Gambar 5.2.	Lokasi Prioritas Program Pengurangan Jumlah Pengangguran Kepala Keluarga.....	85
Gambar 5.3.	Lokasi Prioritas Program Pengurangan Jumlah Pengangguran Individu.....	86
Gambar 5.4.	Lokasi Prioritas Program Penurunan Resiko Stunting.....	87
Gambar 5.5.	Lokasi Prioritas Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Jenjang SD/Sederajat.....	89
Gambar 5.6.	Lokasi Prioritas Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan.....	90
Gambar 5.7.	Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Sanitasi Layak.....	91
Gambar 5.8.	Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Pemerataan Akses Listrik.....	92
Gambar 5.9.	Lokasi Prioritas Sumber Air Minum.....	93
Gambar 5.10.	Lokasi Prioritas Peningkatan Kebutuhan Dasar.....	94

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

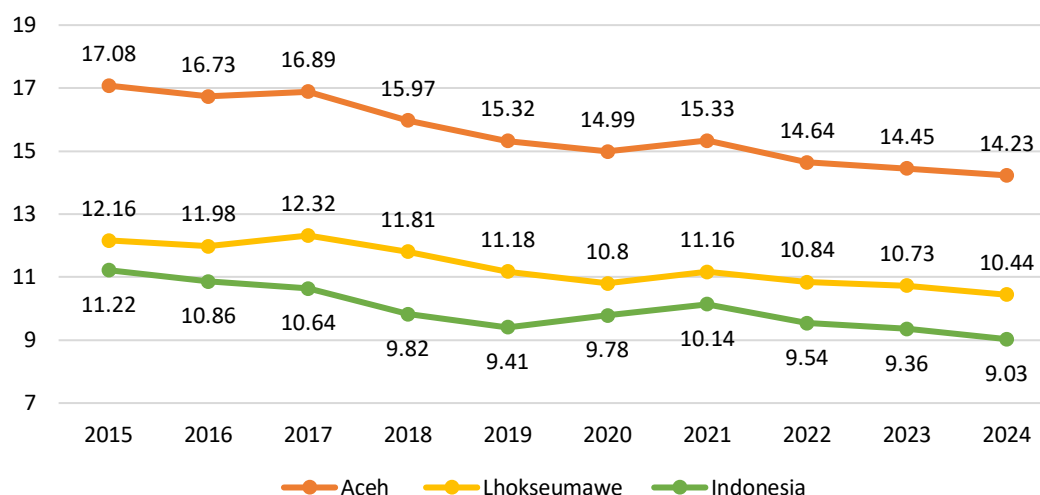
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dari tahun ke tahun menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan. Permasalahan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi.

Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan lainnya. Secara nasional, kebijakan penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter yang salah satunya melalui pengentasan kemiskinan.

Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multidimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Gambar 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe tahun 2015-2024



Secara umum persentase penduduk miskin pada periode tahun 2015-2024 di Kota Lhokseumawe berada diatas nasional dengan persentase pada tahun 2015 berada pada angka 12,16 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 11,22 persen. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi kenaikan presentase kemiskinan akibat pandemi covid, dimana Kota Lhokseumawe sebesar 10,8 persen dan 11,16 persen sedangkan Nasional sebesar 9,78 persen dan 10,14 persen. Tahun 2024 sebesar 10,44 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,03 persen.

Dalam rangka mengupayakan agar penanggulangan kemiskinan terutama di Kota Lhokseumawe dapat lebih terarah, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Lhokseumawe telah menyusun dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2023-2026 yang didukung dengan dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) untuk tahun 2024 untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”.

Dalam pelaksanaannya, TKPK Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Kota Lhokseumawe. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diatas maka TKPK Kota Lhokseumawe perlu penyusunan Rencana Aksi Kota Lhokseumawe sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut sebagai dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Lhokseumawe Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen RAT Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun kedepan.
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya Dokumen RAT Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah.
2. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan.
3. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Lhokseumawe ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN SEBELUMNYA
BAB III	: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB IV	: RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2025
BAB V	: LOKASI PRIORITAS
BAB VI	: PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI

KINERJA TAHUN

SEBELUMNYA

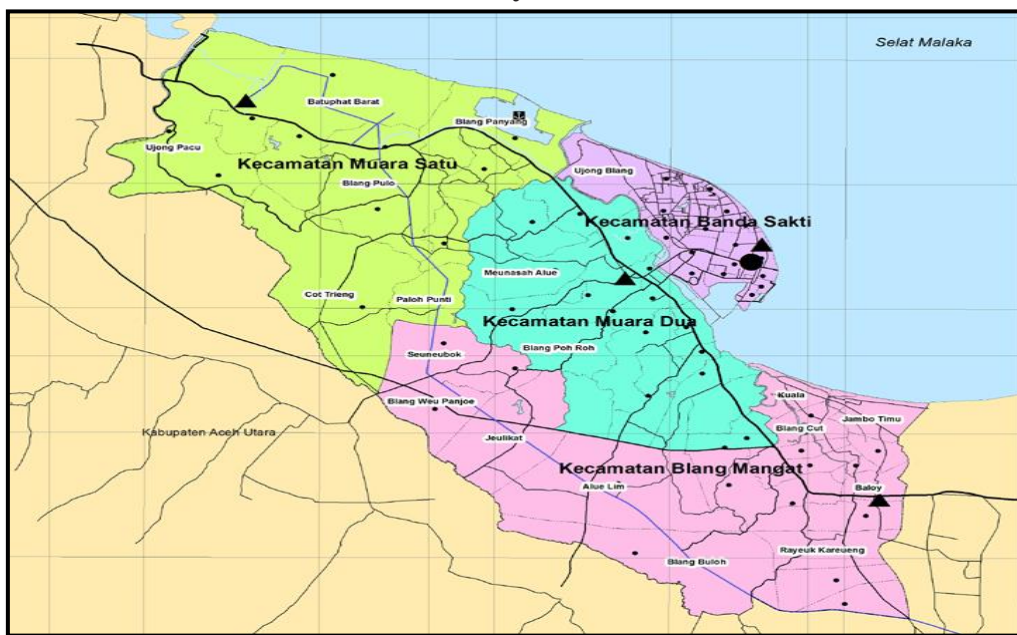
BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 24 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 04°54' Lintang Utara dan 05°18' Lintang Selatan, serta 96°20' dan 97°21' bujur Timur. Rata-rata suhu udara minimum tahun 2024 adalah 26,6° dan rata-rata suhu udara maksimum 29°C. Rata-rata kelembaban udara tahun 2024 berkisar antara 80% sampai dengan 89%. Rata-rata tekanan udara tahun 2024 berkisar antara 1.008,2mb sampai dengan 1.011,9mb. Rata-rata curah hujan tahun 2024 sekitar 81 mm.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

Luas wilayah Kota Lhokseumawe, adalah berupa daratan seluas 181,06 km² atau 18.106 Ha yang terdiri dari 4 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah

55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kab. Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

2.2. Kondisi Umum Kemiskinan

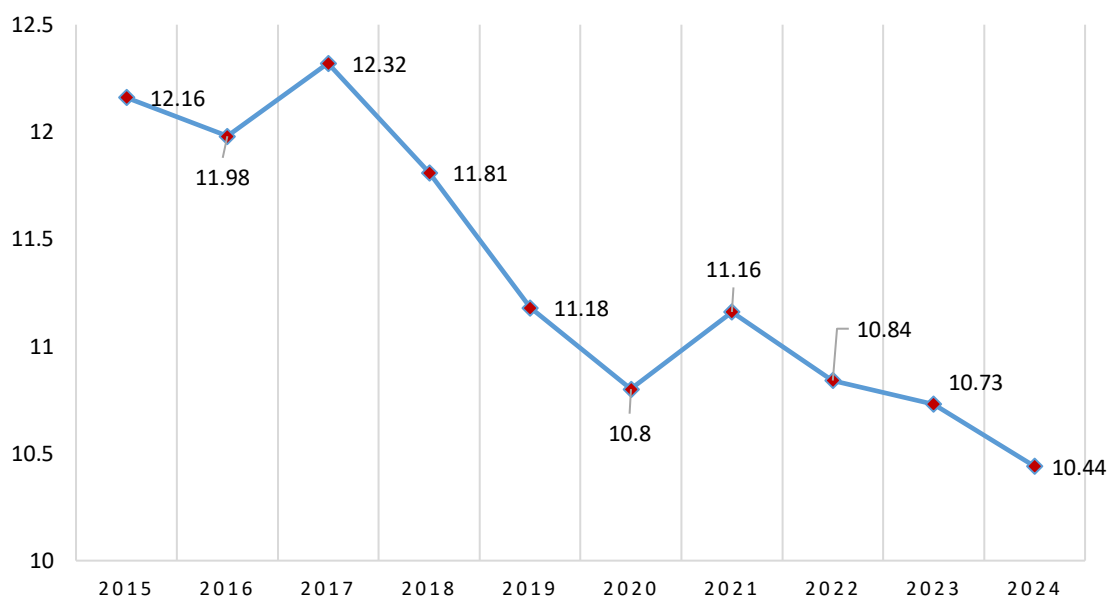
2.2.1. Presentase Penduduk Miskin (P0)

Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin menurut BPS dan Permendagri 86 tahun 2017, yang menjelaskan formulasi dan pengukuran indikator kinerja daerah, merupakan persentase perbandingan antara jumlah orang miskin dengan jumlah penduduk pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Kota Lhokseumawe dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 presentase penduduk mengalami perubahan yang fluktuatif yang tidak terlalu signifikan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 presentase penduduk miskin kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan yaitu dari 12,32% turun menjadi 10,80%. Pada Tahun 2021 presentase kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 11,16% yang disebabkan oleh wabah covid-19. Proporsi penduduk miskin Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 10,73% dan pada tahun 2024 presentase penduduk miskin kota lhokseumawe mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,29% menjadi 10,44%.

Namun demikian secara keseluruhan presentase penduduk miskin Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir membentuk tren linier yang menurun, sehingga kondisi yang ada saat ini dapat dijadikan basis untuk meneruskan penurunan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang. Dengan catatan bahwa Kota Lhokseumawe dapat mempertahankan kecepatan penurunan persentase penduduk miskin dalam beberapa waktu terakhir.

Gambar 2.2
Presentase Penduduk Miskin (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2024



Sumber: BPS

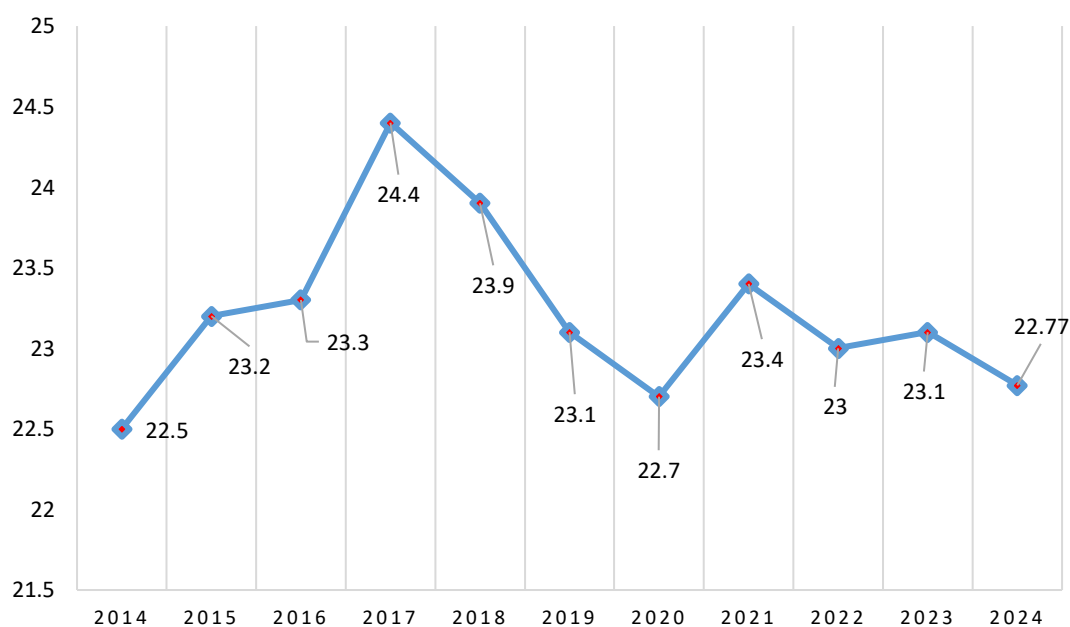
2.2.2. Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami penurunan.

Secara umum, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe memiliki tren yang menurun. Selama periode tahun 2017 sampai 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan 1,7 ribu jiwa, kondisi tersebut kemudian

mengalami kenaikan pasca Covid 19 di tahun 2021 sebanyak 700 jiwa. Sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tersebut turun menjadi 23 ribu jiwa dan pada tahun 2023 Jumlah penduduk miskin kota Lhokseumawe adalah 23,1 ribu jiwa, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan kembali sebesar 330 jiwa menjadi 22,77 ribu jiwa. Capaian terbaik yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 22,5 ribu jiwa dalam 10 tahun terakhir.

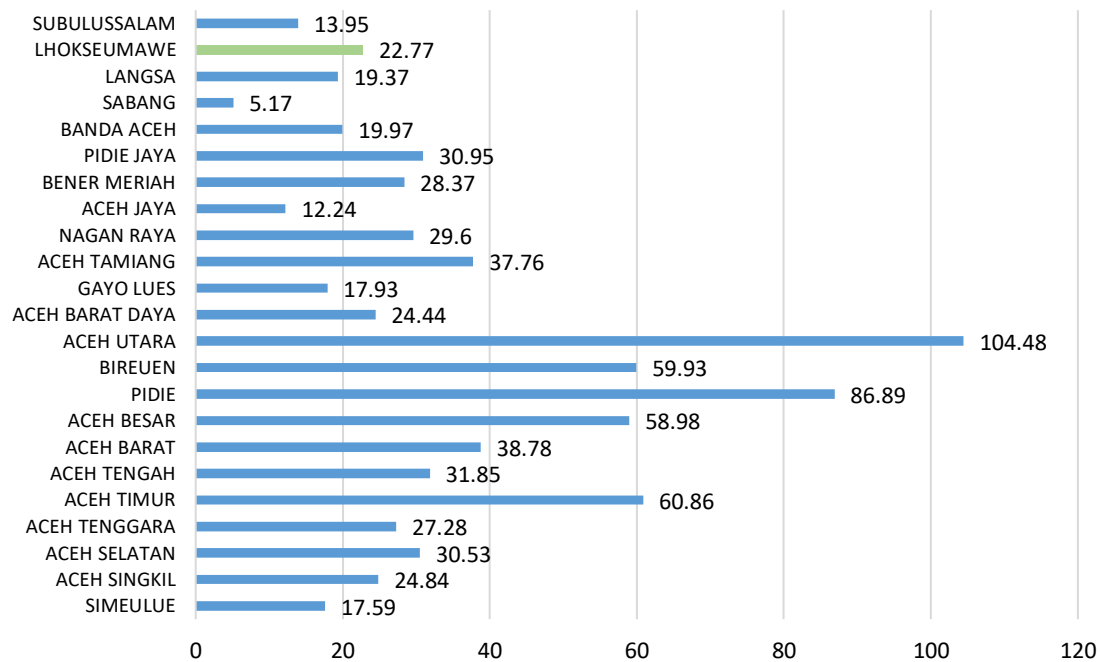
Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2024



Sumber : BPS

Berdasarkan grafik dibawa, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2024, Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke delapan terkecil di Provinsi Aceh.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, Tahun 2024



Sumber : BPS

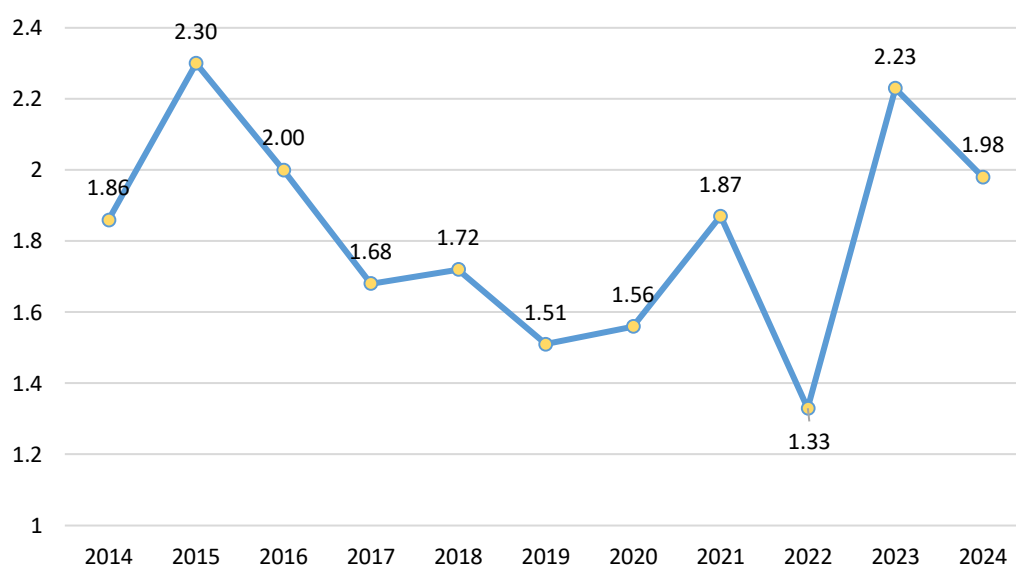
2.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2014 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kota Lhokseumawe sebesar 1,86 poin. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan dari angka 2,30 pada tahun 2015 menjadi 1,68 poin pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 1,72, dan meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,04. Pada tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe turun sebesar 0,21 menjadi 1,51.

Pada tahun 2020 kembali naik sebesar 0,05 menjadi 1,56 poin dan pada tahun 2021 sebesar 1.87 naik lagi sebesar 0,31 dan pada tahun 2022 tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,33 turun sebesar 0,54 dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 2,23 poin dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,98 poin, turun sebesar 0,25 poin.

Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2014-2024

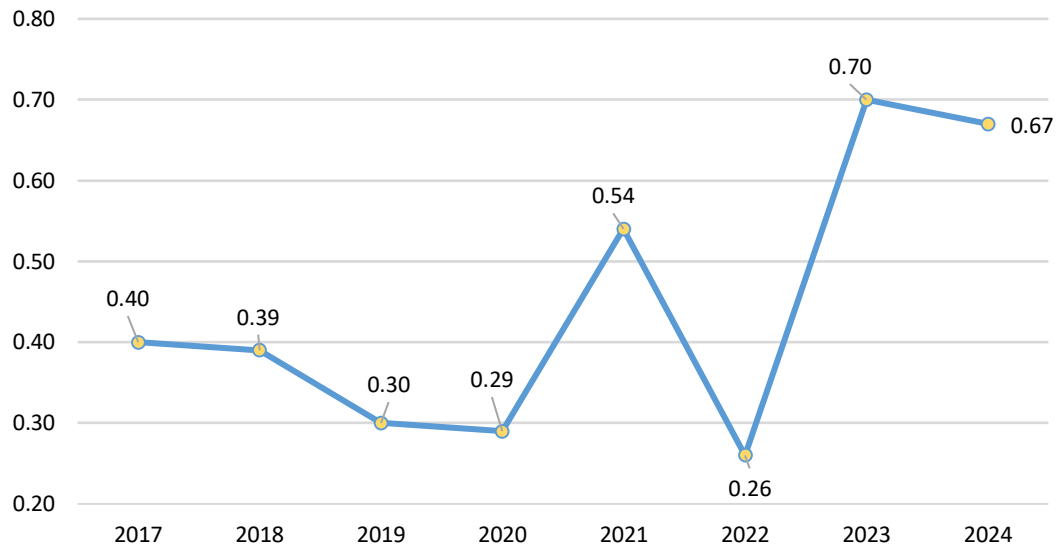


Sumber : BPS

2.2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan Indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan di Kota Lhokseumawe dalam sepuluh tahun terakhir juga berfluktuatif dari tahun 2014-2024. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indeks yang naik turun dari tahun 2014-2024, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,27. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 0,67 poin.

Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2017-2024



Sumber : BPS

2.2.5. Garis Kemiskinan

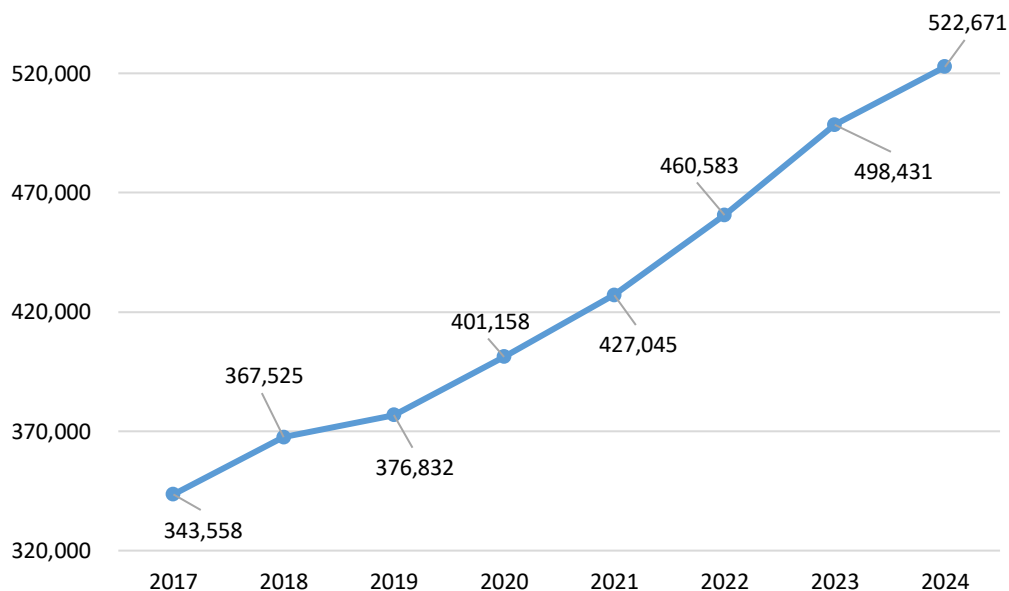
Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Perhitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan garis kemiskinan ini kemudian akan diukur berapa banyak penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar nilai tersebut. Perbandingan dalam persentase antara jumlah penduduk yang pengeluarannya berada dibawah GK terhadap jumlah keseluruhan penduduk disebut sebagai Tingkat Kemiskinan. Oleh karenanya, permasalahan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah baik dipusat, maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai

kebijakan dan program disusun dalam upaya mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan kerentanan kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah dengan garis kemiskinan terendah di Provinsi Aceh. Pada Tahun 2024, Garis kemiskinan Kota Lhokseumawe berada di angka 522.671 rupiah, jumlah rupiah ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2024. Pada Tahun 2017, garis kemiskinan Kota Lhokseumawe berada di angka 343.558 rupiah dan terus meningkat sehingga tahun 2024 garis kemiskinan berada di angka 522.671 rupiah. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam upaya menjaga agar laju inflasi harus benar-benar dalam kendali Pemerintah Kota Lhokseumawe dan perlu memastikan agar harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin khususnya harus murah, terjangkau dan tersedia.

Gambar 2.7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2024



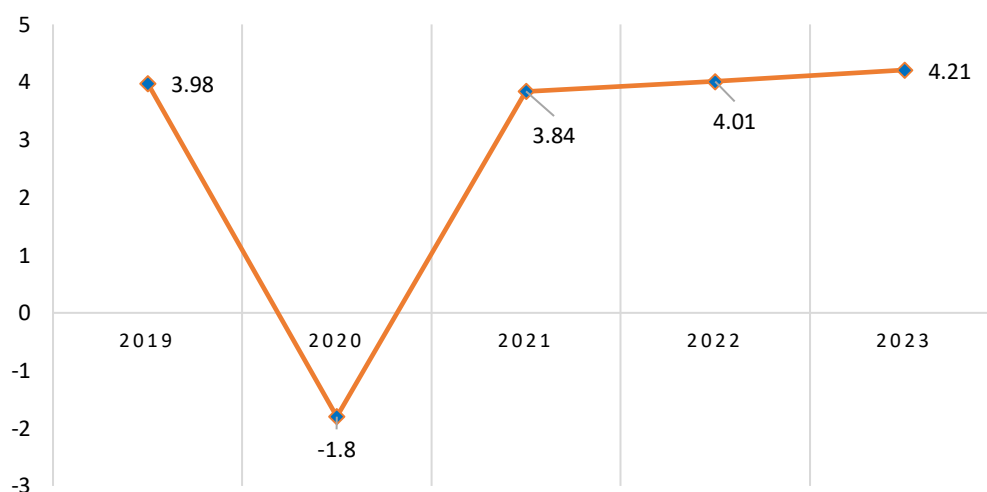
Sumber : BPS

2.3. Kinerja dan Evaluasi Bidang Kemiskinan

2.3.1. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas dalam rentang Tahun 2019-2023, pada tahun 2020 Kota Lhokseumawe pernah mengalami kemunduran, bahkan sampai menyentuh angka -1.8%, dari tahun sebelumnya 3.98%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021, Kota Lhokseumawe mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 3.84%. Pada tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 sebesar 4.21%.

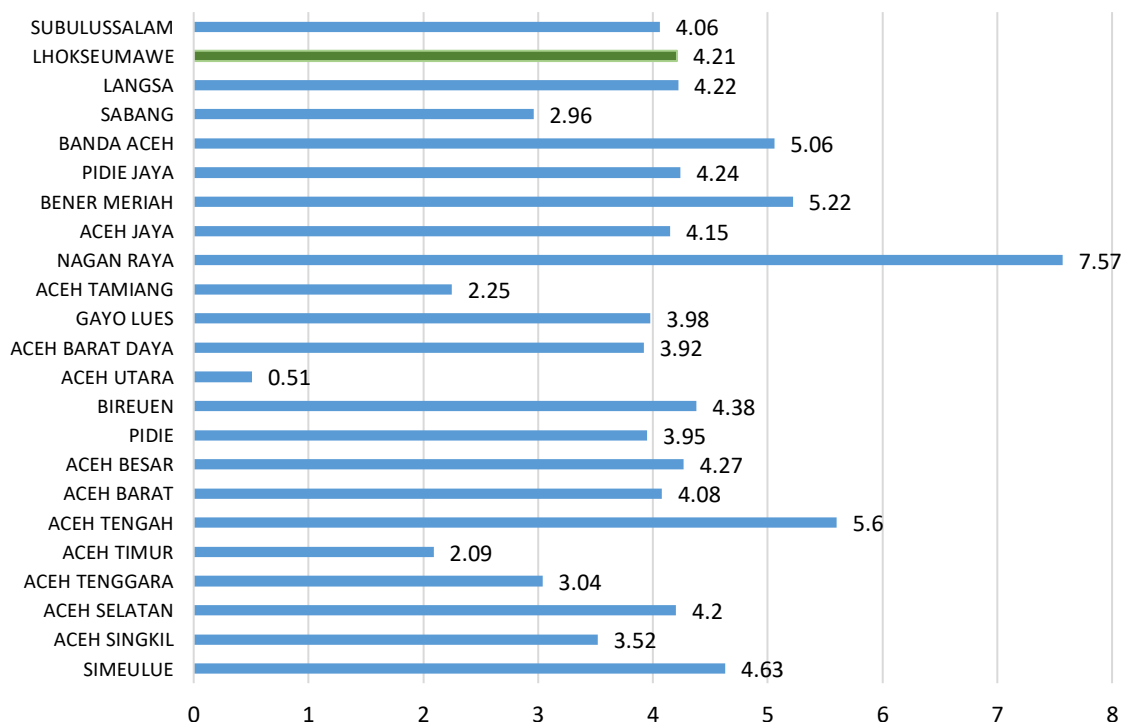
Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas (%) Tahun 2019-2023



Sumber : BPS

Pertumbuhan Ekonomi dengan migas berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 2.9, Kota Lhokseumawe berada pada posisi ke-10 dari posisi tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang mencapai 4.21%, dimana masih berada di bawah Provinsi Aceh dengan nilai sebesar 4.23%.

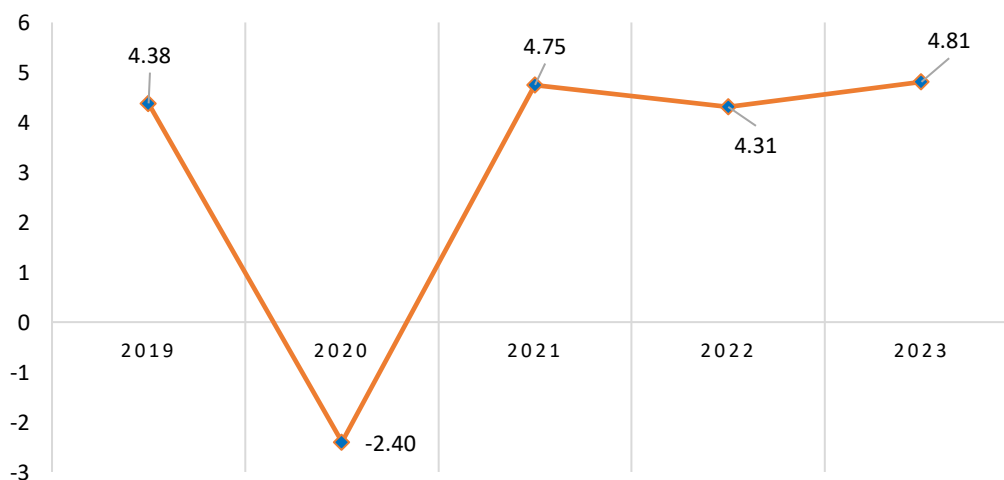
Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota dengan Migas(%) Tahun 2023



Sumber : BPS

Grafik yang sama juga dapat dilihat pada Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas di rentang tahun yang sama. Jika dilihat pada grafik Pertumbuhan dengan Migas dan Tanpa Migas sama-sama mengalami penurunan hingga minus di tahun 2020.

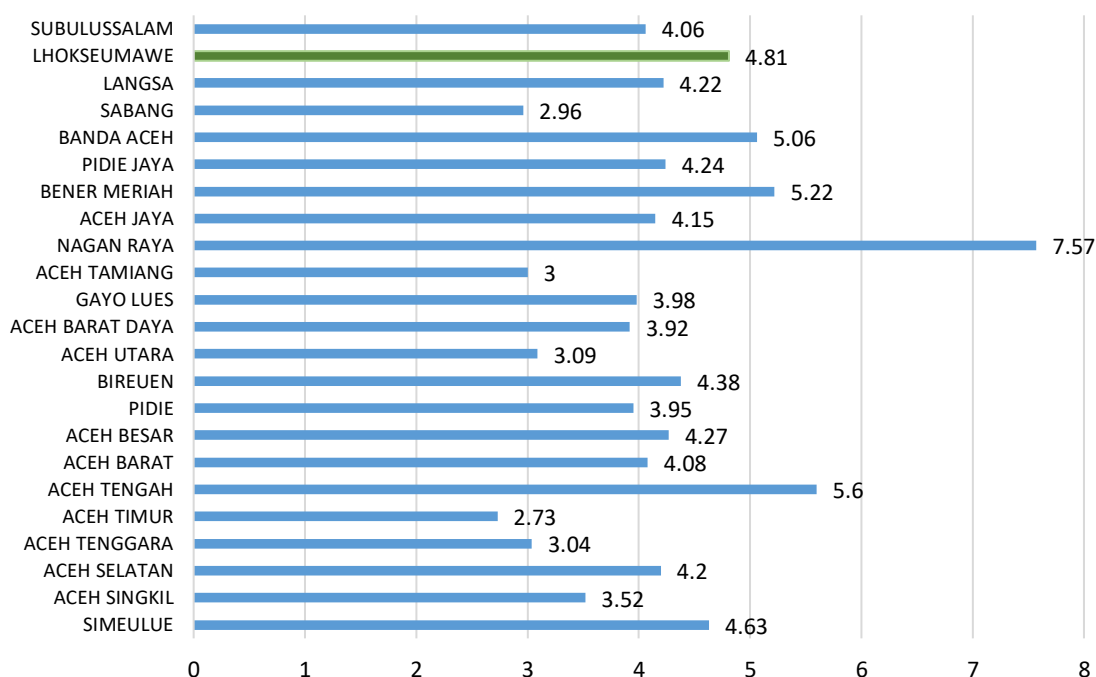
Gambar 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas (%) Tahun 2019-2023



Sumber : BPS

Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 2.11, Kota Lhokseumawe berada pada posisi ke-5 dari posisi tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang mencapai 4.81%, dimana masih berada di bawah Provinsi Aceh dengan nilai sebesar 4.91%. Hal ini lebih tinggi dari Pertumbuhan Dengan Migas.

Gambar 2.11 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tanpa Migas (%) Tahun 2023



Sumber : BPS

Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan merupakan permasalahan pokok makro ekonomi. Peningkatan pengangguran akan menyebabkan pendapatan turun dan tingkat produktivitas juga akan rendah, ini juga berarti investasi juga akan rendah yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengangguran rendah menjadi peran kunci dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menekan angka kemiskinan di wilayah Kota Lhokseumawe sehingga keluar dari garis kemiskinan.

Kota Lhokseumawe terdiri atas empat kecamatan dan 68 gampong. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe, selama periode 2017 s.d 2024

persentase penduduk miskin di Kota Lhokseumawe mengalami fase naik turun atau fluktuasi meskipun tidak terlalu ekstrim.

Tabel 2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2024

No	Uraian	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,51	12,52	11,06	11,99	11,16	9,15	8,78	8,47
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,60	57,48	61,94	63,17	63,91	64,11	64,36	64,61

Sumber: BPS

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 mencapai 10,51 persen Pada Tahun 2018 terjadi kenaikan mencapai 12,52 persen dan terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan hanya berkisar sebesar 11,06 persen pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan 0,93 persen hingga mencapai 11,99 persen sedangkan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan menjadi 8,78 persen Pada tahun 2023.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2017 sebesar 62,60 persen, menurun menjadi 57,48 persen di tahun 2018, namun selanjutnya menunjukkan trend yang terus naik menjadi 61,94 persen di tahun 2019, mengalami kenaikan kembali menjadi 63,17 persen pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2023 sebesar 64,36 persen. Dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka dapat mempengaruhi terhadap jumlah tingkat pengangguran.

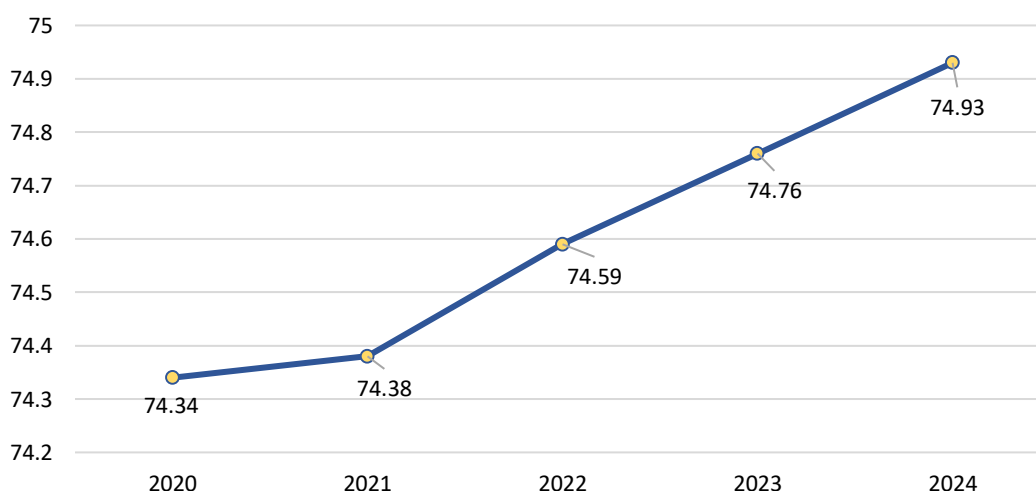
2.3.2. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas setiap manusia. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

2.3.2.1 Umur Harapan Hidup (UHH)

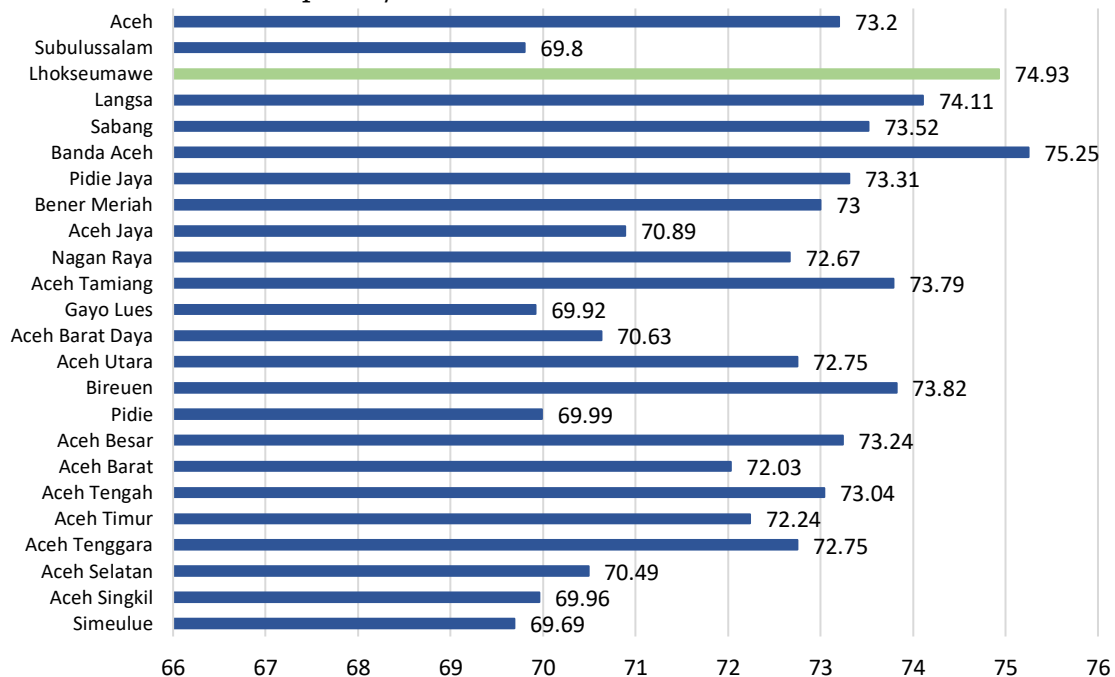
Umur harapan hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata berapa lama seseorang diharapkan dapat hidup, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini tetap sama sepanjang hidupnya. UHH juga sering dihitung pada saat lahir, menunjukkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Gambar 2.12 dibawah menunjukkan Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe meningkat setiap tahunnya. Pada Gambar 2.13 menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada pada posisi ke-2 tertinggi setelah Kota Banda Aceh. Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe sebesar 74,93% mencapai lebih dari angka Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Aceh sebesar 73,2%.

Gambar 2.12 Umur Harapan Hidup (UHH)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber : BPS

Gambar 2.13 Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024

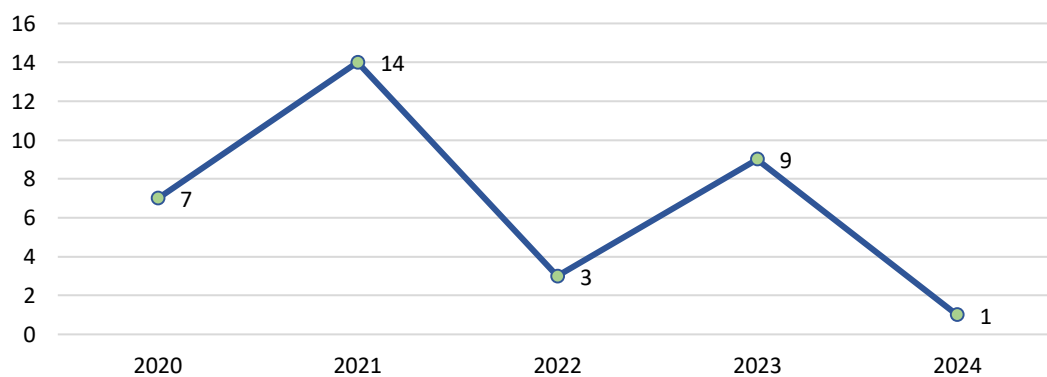


Sumber : BPS

2.3.2.2 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Gambar 2.14 Angka Kematian Ibu Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



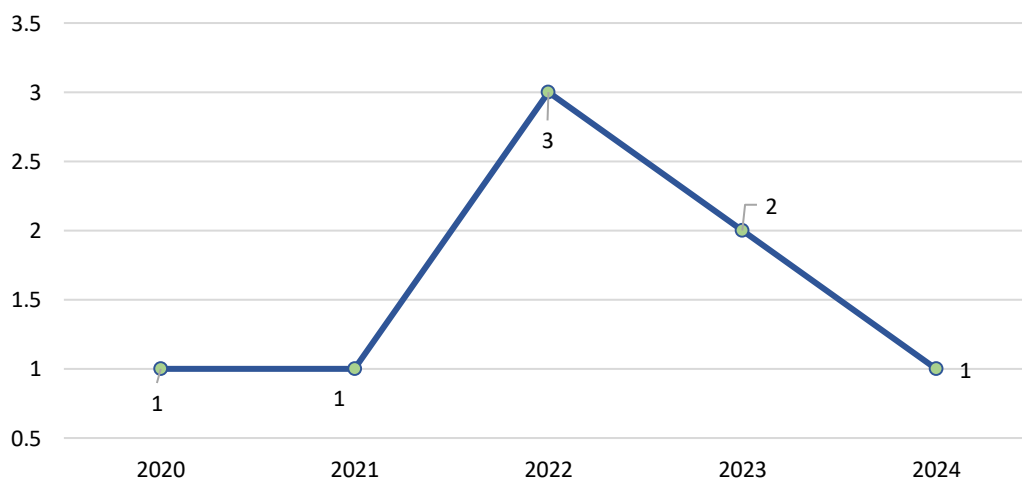
Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2024

Pada Gambar 2.14 di atas, jumlah kasus kematian ibu Kota Lhokseumawe tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 14 kasus, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kematian ibu menurun drastis dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2024 jumlah kematian Ibu sangat menurun drastic menjadi 1 kasus kematian, artinya Kota Lhokseumawe berhasil menurunkan angka kematian Ibu.

2.3.2.3 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi (AKB) ini juga berdasarkan data yang diterima Dinkes Kota Lhokseumawe. Pada Gambar 2.15 tahun 2020, jumlah kasus kematian bayi Kota Lhokseumawe adalah 1 kasus. Pada Tahun 2022 Jumlah kasus kematian bayi relatif masih tinggi dibandingkan dengan 5 tahun terakhir dengan jumlah 3 kasus. Pada tahun 2024 kasus kematian sebanyak 1 kasus, artinya Kota Lhokseumawe berhasil menurunkan angka kematian bayi.

Gambar 2.15 Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



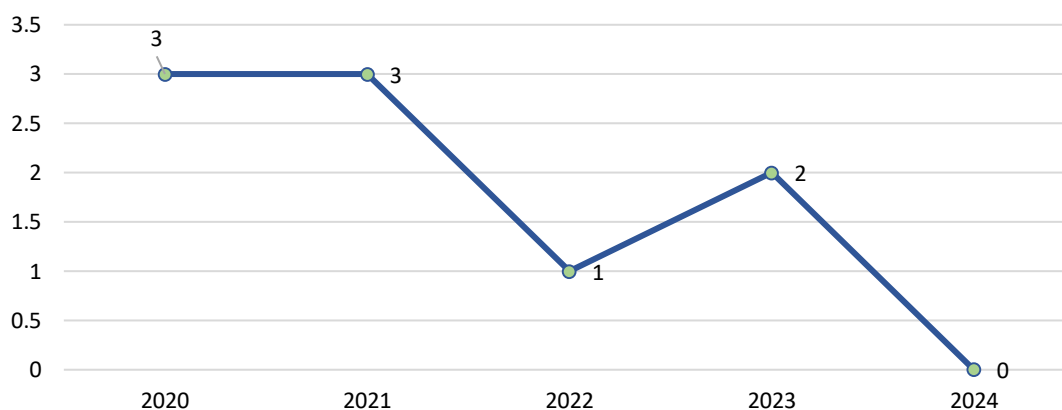
Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2024

2.3.2.4 Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka ini merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Gambar 2.16. Angka Kematian Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2024

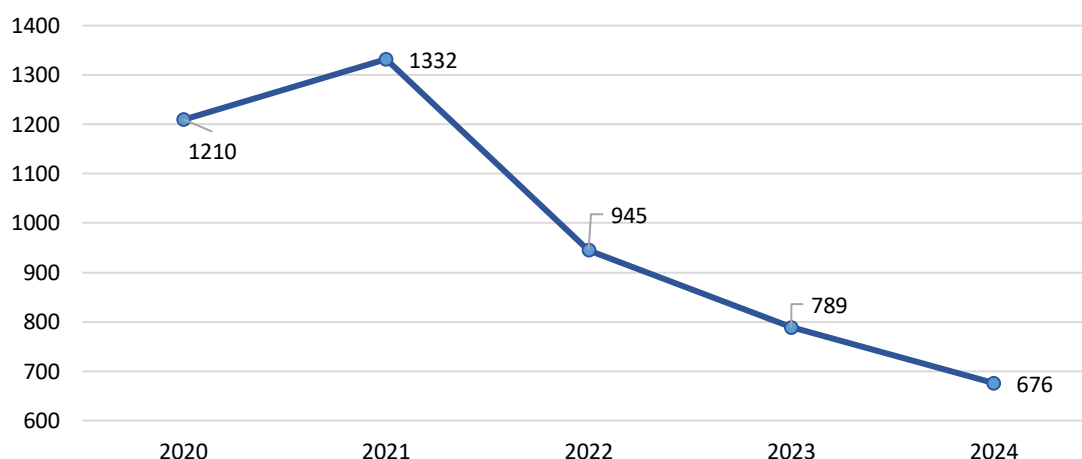
Pada Gambar 2.16 Angka Kematian Balita dari tahun 2020-2024 terus mengalami perubahan yang fluktuatif. Berdasarkan data di atas, jumlah kasus kematian Balita Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 kasus. Jumlah kasus kematian Balita pada tahun 2024 menjadi 0 kasus, artinya Kota Lhokseumawe berhasil menghilangkan Angka Kematian Balita.

2.3.2.5 Prevalensi Stunting pada Balita

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi, balita termasuk kelompok yang rawan gizi serta mudah menderita kelainan gizi

karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. Pada anak-anak, kurang gizi bisa menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, berat badan kurang, serta *stunting*.

Gambar 2.17 Prevalensi Stunting pada Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tahun 2021-2024 Balita kurang gizi terus mengalami penurunan. Berdasarkan Gambar 2.17 di atas, banyaknya balita kurang gizi Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1332 anak. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 945 anak, berkurang 387 anak dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 789 anak, dan pada Tahun 2024 balita kurang gizi sebesar 676 anak, berkurang sebanyak 656 anak jika dibandingkan tahun 2021 yang artinya Kota Lhokseumawe hampir mengurangi setengah dari jumlah pada tahun 2021.

2.3.2.6 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Apotek. Keberadaan sarana kesehatan di tiap wilayah atau daerah sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan laporan

Statistik Kota Lhokseumawe pada Tabel 2.2 dibawah, terdapat 8 Rumah Sakit, 33 Poliklinik, 7 Puskesmas, 24 Puskesmas Pembantu, 19 Apotek, dan Total Sarana Kesehatan 91 Sarana di Kota Lhokseumawe. Kecamatan Banda Sakti memiliki sarana Kesehatan paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya sebanyak 36 sarana kesehatan, dan kecamatan Muara Satu yang memiliki sarana Kesehatan paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya sebanyak 13 Sarana Kesehatan.

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek	Total
Blang Mangat	1	11	2	8	4	26
Muara Dua	1	6	2	4	3	16
Muara Satu	1	3	1	3	5	13
Banda Sakti	5	13	2	9	7	36
Lhokseumawe	8	33	7	24	19	91

Sumber: BPS

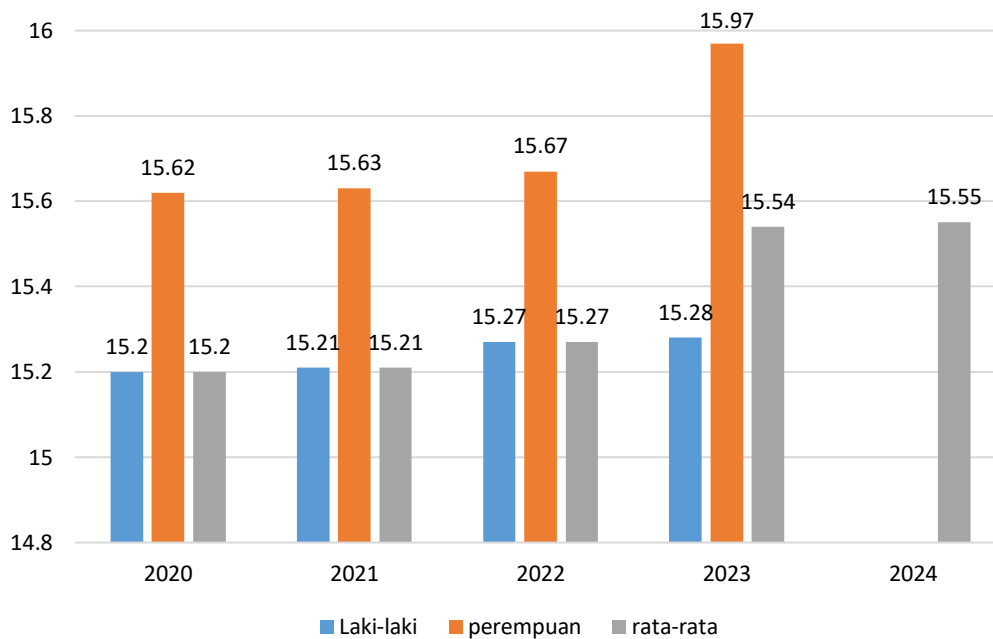
2.3.3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

2.3.3.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS merupakan indikator yang digunakan untuk melihat potensi pendidikan seseorang di masa depan, berdasarkan peluang mereka untuk tetap bersekolah. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada Gambar 2.18 dapat dilihat angka harapan lama sekolah (HLS) Kota Lhokseumawe, jumlah partisipasi Perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki pada setiap tahunnya. Dilihat rata-rata tiap tahunnya angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 sebesar 15,55%.

Gambar 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (%) Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024



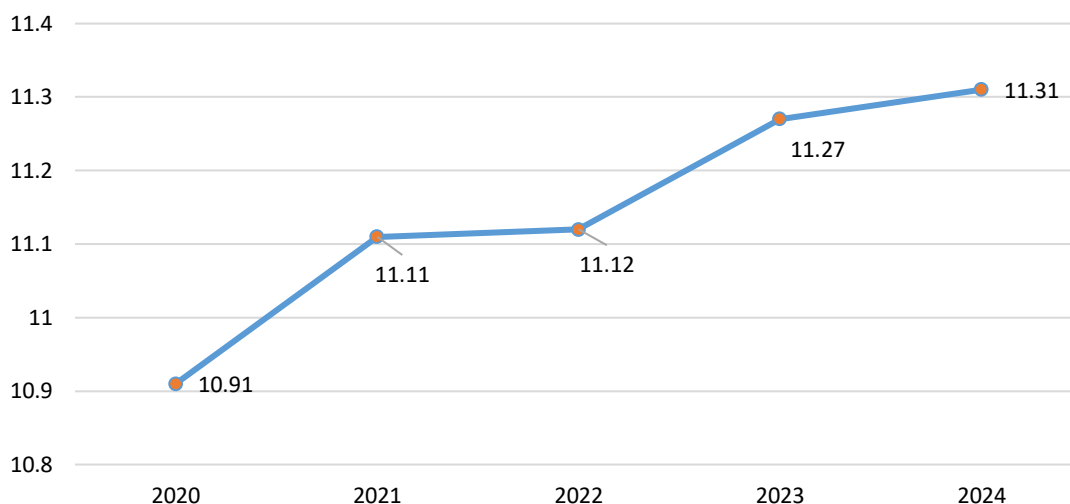
Sumber: BPS

2.3.3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (%)

Angka yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Secara sederhana, RLS mencerminkan tingkat pendidikan rata-rata suatu wilayah atau kelompok populasi.

Jika dilihat pada gambar 2.19 Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan di 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah kota Lhokseumawe sebesar 10,91% , tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,2% menjadi 11,11%, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah kota Lhokseumawe sebesar 11,31%, artinya tingkat pendidikan rata-rata Kota Lhokseumawe terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Gambar 2.19
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (%) Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

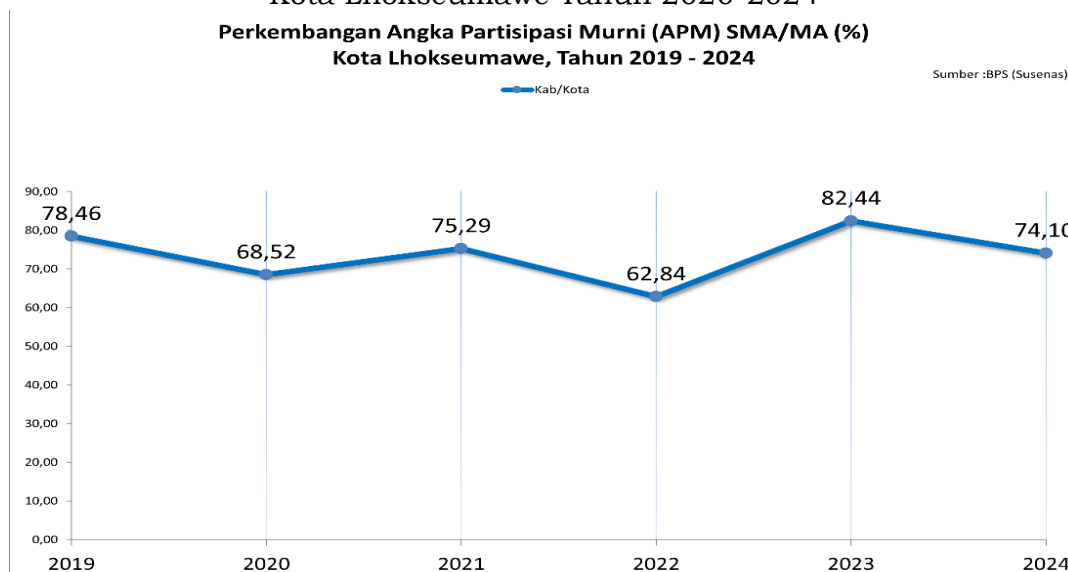


Sumber: BPS

2.3.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. Dengan kata lain, APM mengukur seberapa banyak anak-anak usia sekolah yang bersekolah "tepat waktu" di jenjang pendidikan yang sesuai.

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Dari Gambar 2.20 dapat dilihat capaian Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kota Lhokseumawe tahun 2019 sampai tahun 2024 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2024 adalah 74,10%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 25,90% anak usia 16-18 tahun (usia SMA/MA) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

2.3.4. Bidang Infrastruktur

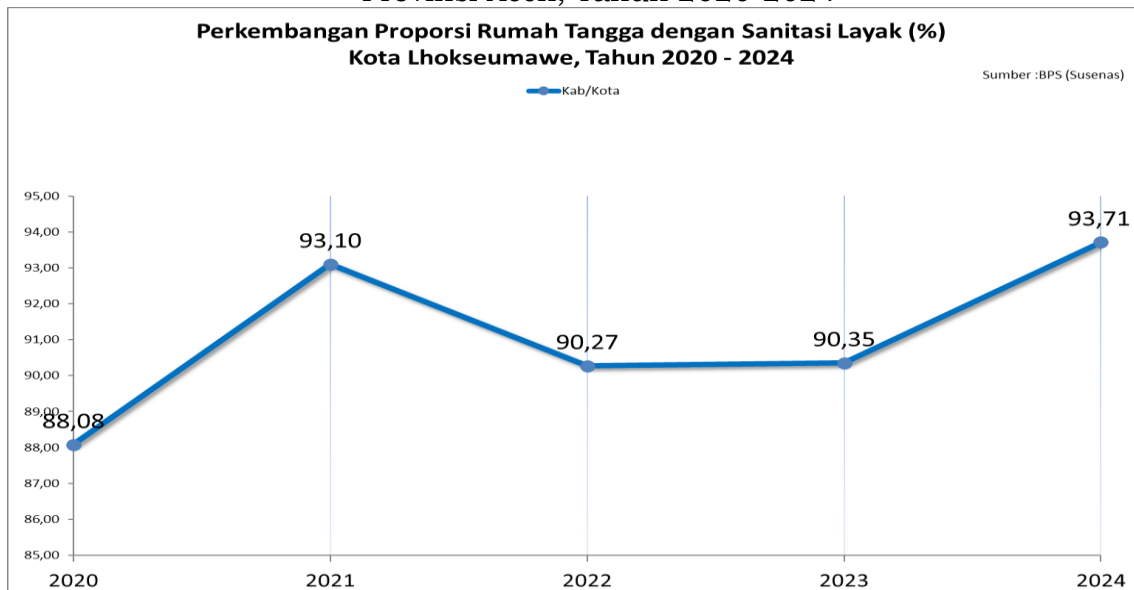
Analisis bidang infrastruktur dasar yang merupakan salah satu karekteristik terpenting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kondisi perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan.

2.3.4.1 Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. (BPS).

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Gambar 2.21
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh, Tahun 2020-2024



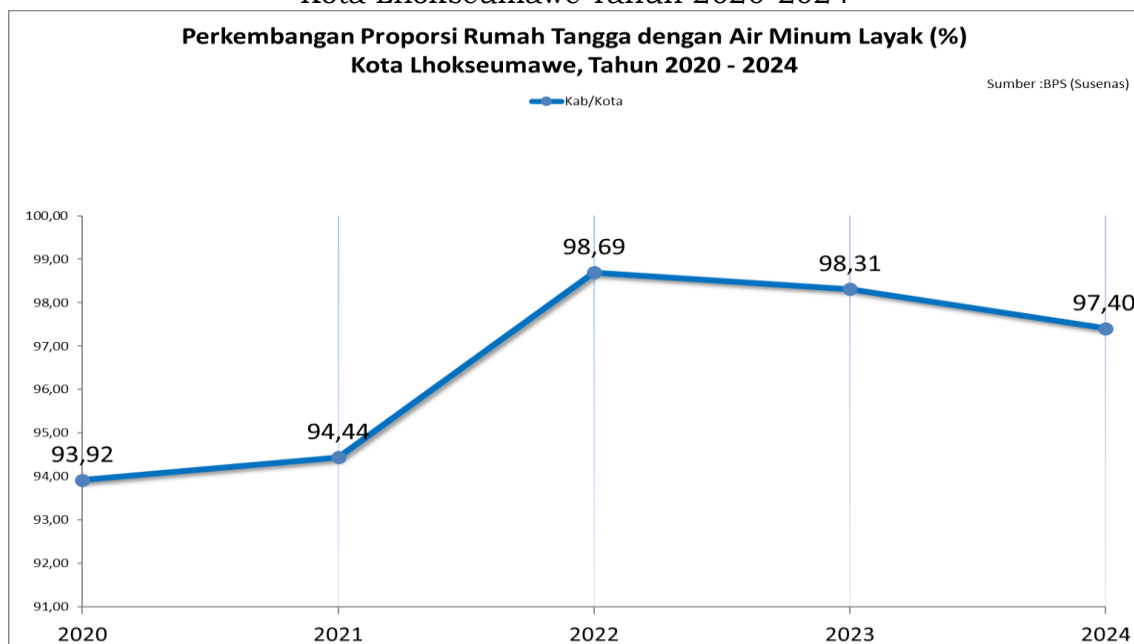
Pada gambar 2.21 diatas dalam kurun waktu tahun 2020-2024, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Lhokseumawe terus mengalami perkembangan fluktuatif. Namun pada tahun 2021, mengalami peningkatan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dari 88,08% pada tahun 2020 naik menjadi 93,10% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2022. Pada tahun 2024 proporsi rumah tangga paling tinggi dalam 5 tahun yaitu sebesar 93,71%.

2.3.4.2 Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada konsep ini sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika

sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

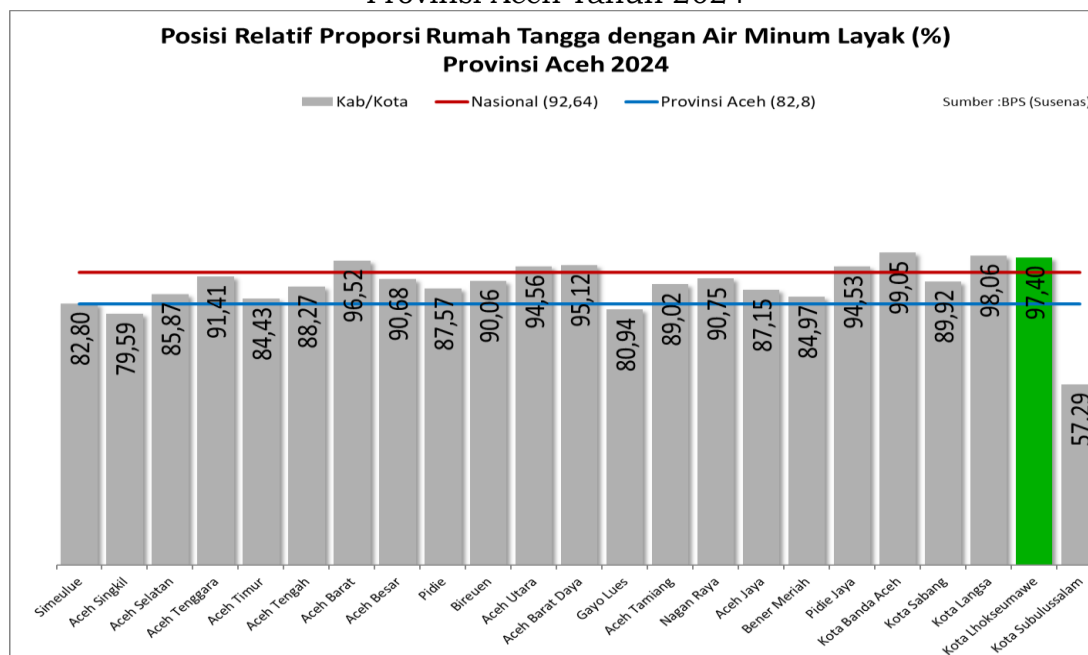
Gambar 2.22
Presentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: BPS

Pada gambar 2.22 dari tahun 2020-2024 Presentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak terus mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 presentasi rumah tangga dengan air minum layak sebesar 93,92%, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dengan presentase sebesar 98,69%. Dan mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 97,40%, artinya Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe dengan Air Minum Layak sudah baik.

Gambar 2.23
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh Tahun 2024



Sumber: BPS

Penurunan efektifitas penanganan akses air minum layak di kota Lhokseumawe ini disebabkan karena Kota Lhokseumawe tidak terdapat air baku. Sebagian besar penduduk Kota Lhokseumawe menggunakan air dari PDAM Tirta Mon Pase yang berasal dari Aceh Utara.

Pada Gambar 2.23 posisi relatif rumah tangga dengan air minum layak Kota Lhokseumawe sebesar 97,40% berada diatas Provinsi Aceh sebesar 82,8% dan juga berada diatas Nasional sebesar 92,64%, artinya Kota Lhokseumawe sudah mampu menyediakan air minum layak untuk rumah tangga.

2.3.4.3 Rumah Tangga dengan Akses Listrik

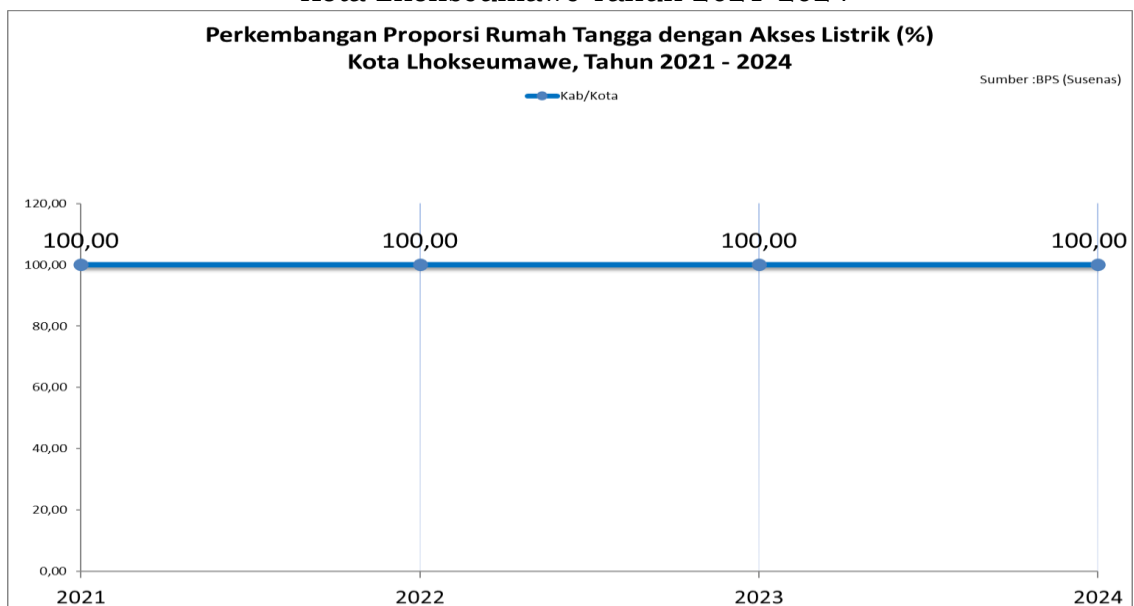
Capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan akses listrik PLN Kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah 100%, artinya semua rumah tangga penduduk Kota Lhokseumawe sudah memiliki listrik.

Tabel 2.3. Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, jenis kelamin KRT, dan sumber penerangan Provinsi Aceh Tahun 2022

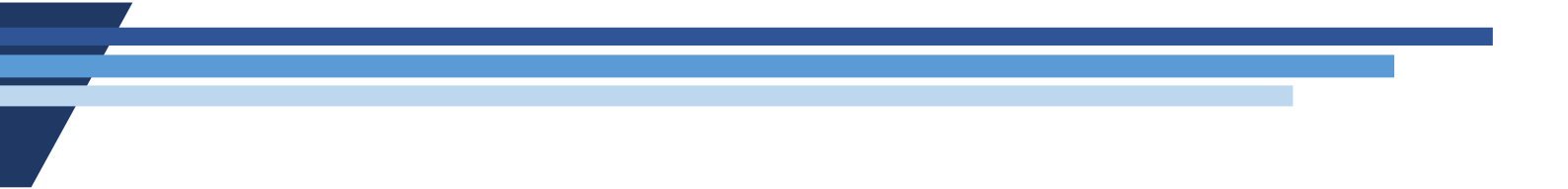
Kabupaten/Kota	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
	Xlistrik				Xlistrik				Xlistrik			
	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan listrik	Total	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan listrik	Total	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan listrik	Total
SIMEULUE	98,32	0,57	1,12	100	99,74	0,00	0,26	100	98,52	0,49	0,99	100
ACEH SINGKIL	99,45	0,55	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,53	0,47	0,00	100
ACEH SELATAN	99,45	0,28	0,27	100	100,00	0,00	0,00	100	99,57	0,22	0,21	100
ACEH TENGGARA	99,92	0,00	0,08	100	100,00	0,00	0,00	100	99,93	0,00	0,07	100
ACEH TIMUR	99,92	0,00	0,08	100	100,00	0,00	0,00	100	99,93	0,00	0,07	100
ACEH TENGAH	99,83	0,00	0,17	100	100,00	0,00	0,00	100	99,85	0,00	0,15	100
ACEH BARAT	99,97	,03	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,98	0,02	0,00	100
ACEH BESAR	100,00	0,00	0,00	100	99,28	0,43	0,29	100	99,87	0,08	0,05	100
PIDIE	100,00	0,00	0,00	100	99,89	0,00	0,11	100	99,97	0,00	0,03	100
BIREUEN	99,29	0,00	0,71	100	100,00	0,00	0,00	100	99,48	0,00	0,52	100
ACEH UTARA	99,58	0,00	0,42	100	99,49	0,00	0,51	100	99,56	0,00	0,44	100
ACEH BARAT DAYA	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
GAYO LUES	96,48	3,37	0,15	100	98,50	1,50	0,00	100	96,72	3,15	0,13	100
ACEH TAMIANG	99,34	0,66	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,43	0,57	0,00	100
NAGAN RAYA	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
ACEH JAYA	99,71	0,00	0,29	100	100,00	0,00	0,00	100	99,76	0,00	0,24	100
BENER MERIAH	99,36	0,44	0,20	100	100,00	0,00	0,00	100	99,45	0,38	0,17	100
PIDIE JAYA	99,86	0,00	0,14	100	100,00	0,00	0,00	100	99,90	0,00	0,10	100
BANDA ACEH	99,78	0,22	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,81	0,19	0,00	100
SABANG	98,92	0,00	1,08	100	99,34	0,00	0,66	100	98,98	0,00	1,02	100
LANGSA	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
LHOKSEUMAWE	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
SUBULUSSALAM	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
PROVINSI	99,65	0,17	00,18	100	99,84	,05	0,11	100	99,69	0,15	,16	100

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas Maret 2022.

Gambar 2.24
Presentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024



Sumber: BPS



Rumah tangga dengan akses listrik adalah rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dan daya listrik, yang dapat berasal dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau sumber non-PLN seperti generator, pembangkit listrik tenaga surya, atau akumulator. Pada Gambar 2.24 dibawah dapat dilihat bahwa Rumah Tangga dengan akses Listrik sudah mencapai 100% setiap tahunnya dengan sumber Listrik berasal dari PLN.



BAB III

KEBIJAKAN DAN

STRATEGI TAHUN

BERJALAN

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- ❖ Dukungan politik, komitmen dan kesungguhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- ❖ Kepemimpinan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- ❖ Meningkatkan efektivitas setiap nilai rupiah, program dan anggaran oleh seluruh perangkat daerah agar menjawab apa masalah, menjawab akar masalah, menjawab di mana masalah itu terjadi dan memastikan ketepatan individu dan rumah tangga penerima manfaat secara tepat dan benar.
- ❖ Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah.
- ❖ Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian inflasi dan memastikan harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin agar murah, tersedia dan terjangkau.
- ❖ Menggunakan data P3KE dalam penjangkauan dan penajaman sasaran intervensi oleh seluruh perangkat daerah.
- ❖ Memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk dalam meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

- ❖ Memastikan program perlindungan sosial yang digulirkankan oleh pemerintah pusat dapat diterima secara tepat oleh masyarakat sasaran.

3.1.2. Kebijakan Pendidikan

- ❖ Perlunya perhatian pemerintah Kota Lhokseumawe untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan usia sekolah melalui program pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan rentan.
- ❖ Meningkatkan dan mengoptimalkan program penjangkauan anak putus sekolah melalui program Kejar Paket A dan Paket B dalam meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun.
- ❖ Mengarustamakan intervensi program pendidikan inklusif terutama bagi yang berkebutuhan khusus.
- ❖ Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan melakukan regrouping atau penggabungan beberapa sekolah yang tidak dapat memenuhi standar minimal pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan produktivitas proses belajar mengajar di kelas, meningkatkan minat dan semangat anak untuk hadir dan belajar di sekolah, memaksimalkan pengawasan terhadap sejumlah sekolah, dan terjadinya pemerataan guru.
- ❖ Melakukan pemerataan tenaga pendidik terutama guru pengajar, baik guru yang berstatus pegawai tetap maupun honorer, khususnya di daerah-daerah pelosok.
- ❖ Meningkatkan persentase alokasi anggaran kegiatan yang mendukung peningkatan mutu kualitas pendidikan dasar seperti peningkatan fasilitas sarana-prasarana sekolah, terutama pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta pengadaan buku dan alat praktik.

- ❖ Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan pada bentuk kegiatan untuk peningkatan mutu kompetensi tenaga pendidik, seperti pemberian beasiswa guru untuk melanjutkan program setara S1 dan pelaksanaan uji kompetensi.
- ❖ Mengalokasikan anggaran kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- ❖ Meningkatkan alokasi anggaran untuk proses penilaian akreditasi sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan akses infrastruktur yang terbatas.
- ❖ Memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan wilayah (kecamatan dan kampung), sehingga tidak dilakukan dengan pola bagi rata di seluruh wilayah.
- ❖ Perlu dilakukannya pemuktahiran data dalam Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe yang dilakukan setiap tahun dan dapat diakses oleh publik melalui media online (website pemerintah daerah).

3.1.3. Kebijakan Kesehatan

- ❖ Memperkuat basis pelayanan Kesehatan, Ibu dan Anak (KIA) dalam jaminan kesehatan. Dimana pemerintah menanggung premi asuransi bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, cakupan pelayanan ibu hamil, melahirkan, pasca melahirkan dan pelayanan kesehatan anak juga tersedia dalam skema jaminan kesehatan.
- ❖ Melakukan evaluasi kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengetahui sejauh mana tenaga medis dan fasilitas kesehatan terdistribusi secara merata dan berkualitas antar kecamatan atau desa, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- ❖ Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan (SOP) kesehatan terutama di puskesmas, pustu, polindes, posyandu, dan rumah sakit.

- ❖ Meningkatkan pelayanan antar-jemput gratis persalinan terutama penduduk yang tinggal di wilayah terpencil, disertai dengan peningkatan akses infrastruktur terutama jalan menuju tempat persalinan terdekat.
- ❖ Penguatan sistem rujukan internal baik untuk maternal maupun neonatal terutama kepada pasien pasca operasi di RSUD.
- ❖ Penguatan sosialisasi oleh seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu mengenai pentingnya kesadaran ibu hamil agar melahirkan di tempat fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.
- ❖ Mengembangkan sistem deteksi dan kewaspadaan dini penyakit/wabah dengan melibatkan peran serta dari masyarakat di lingkungan setempat, terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
- ❖ Meningkatkan pelaksanaan kegiatan supervisi fasilitatif bidan koordinator di tingkat puskesmas kabupaten hingga tingkat desa, dengan pembinaan aspek klinis, non klinis, logistik dan manajemen KIA.
- ❖ Meningkatkan kompetensi bidan dalam penatalaksanaan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care (ANC) terpadu sehingga tidak hanya mampu mendeteksi dini ibu hamil dengan risiko tinggi tetapi juga mampu mengetahui faktor risiko penyebab komplikasi.
- ❖ Penguatan sistem rujukan balik dari rumah sakit ke puskesmas sehingga setiap kasus neonatal yang terjadi di rumah sakit terdeteksi dengan cepat oleh bidan puskesmas.
- ❖ Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pelacakan kasus neonatal risiko tinggi.
- ❖ Revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan sosialisasi penundaan usia perkawinan.

- ❖ Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan melakukan implementasi kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Sehingga anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD dapat terealisasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- ❖ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan mengalokasikan lebih besar porsi anggaran kepada program-program dan kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pentingnya PHBS dan lingkungan sehat oleh dinas-dinas terkait.

3.1.4. Kebijakan Infrastruktur Dasar

- ❖ Revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang kurang memadai terutama di berbagai kantong wilayah kumuh perkotaan, seperti: penyaluran air bersih, pengolahan limbah, sistem pengelolaan sampah, saluran drainase dan penanggulangan banjir, dan perbaikan kondisi jalan.
- ❖ Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembangunan rumah layak huni termasuk pengembangan rumah sehat, pipanisasi air bersih, dan air minum bagi rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
- ❖ Program dan kegiatan infrastruktur yang telah diagendakan dan dialokasikan dalam anggaran APBD sedapat mungkin segera direalisasikan agar pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana.
- ❖ Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pada evidence based dan data yang tersedia.

- ❖ Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan sanitasi layak, air minum layak, akses listrik, rumah layak huni setiap tahun dalam APBD Kota Lhokseumawe.
- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dimana masyarakat dilibatkan pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan.

3.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui:

- a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;
- c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan

- e. pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).

2) Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

- a. peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
- c. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan
- d. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Kegiatan sesuai dengan KEPMENDAGRI NO. 900.1.15.1-1317 Tahun 2023

Tabel 3.1. Matriks Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.725.000.000	APBK	1.704.415.430	Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat	10 unit/ 4 kecamatan
2	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.067.104.980	DAK	4.031.022.680	Muara Satu, Banda Sakti, Blang Mangat	5 kelompok/ gampong (Asan Kareung, Mesjid Meuraksa, Mesjid Punteut dan Ujong Blang
3	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25.000.000	APBK	24.950.000	Semua Kecamatan Kota Lhokseumawe	1 dokumen
4	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Peningkatan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum (Psu)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.508.143.684	APBK	5.462.490.180	Semua Kecamatan Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
5	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	841.268.104	APBK	838.703.087	Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu	26 Unit
6	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	417.703.100	DAU	399.670.174	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	79.000.000	DAU	78.254.500	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan dan 68 Gampong
8	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10.000.000	DAU	8.999.500	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan
9	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	99.040.221	DAU	94.801.636	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan
10	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	DAU	24.374.600	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan dan 68 Gampong
11	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.840.000	DAU	0	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
12	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000	DAU	50.000.000	4 Kecamatan	20 Unit Usaha
13	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	177.750.324	DAU Bidang Pendidikan dan DBH-CHT	177.750.000	Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua, Muara Satu	40 orang
14	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30.000.000	DAU	29.986.800	Kota Lhokseumawe	1 Keluarga
15	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.000.000	DAU	23.999.700	Kota Lhokseumawe	60 Orang
16	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.999.810	DAU	9.999.400	Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
17	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20.000.000	DAU	18.006.400	Kota Lhokseumawe	7 Kelompok

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
18	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	25.000.000	DAU	25.000.000	Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
19	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	350.000.000	DAU	335.740.239	Kota Lhokseumawe	11 orang
20	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.997.245	DAU	9.997.245	Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
21	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	350.000.000	DAU	349.758.257	Kota Lhokseumawe	2 kelompok
22	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	DAU	19.948.506	Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
23	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU	24.999.700	Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
24	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan & Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20.000.000	DAU	19.639.700	Kota Lhokseumawe	20 Unit Usaha

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
25	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	850.000.000	DAU	844.922.600	Kota Lhokseumawe	170 orang
26	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	30.000.000	DAU	29.967.600	Kota Lhokseumawe	6 orang
27	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.000.000	DAU	14.929.400	Kota Lhokseumawe	masyarakat
28	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	700.000.000	DOKA	692.268.500	Kota Lhokseumawe	198 orang
29	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.756.640.000	DAK Non Fisik	2.756.640.000	4 Kecamatan	132 satuan pendidikan
30	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	601.340.000	DAK Non Fisik	601.340.000	4 Kecamatan	3 satuan pendidikan
31	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.824.827.000	DAU	17.824.827.000	4 Kecamatan	110 satuan pendidikan
32	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.327.900.000	DAU	9.327.900.000	4 Kecamatan	25 satuan pendidikan
33	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.352.894.600	DANA OTSUS dan DAU	6.208.969.607	4 Kecamatan	12 Ruang (9 satuan pendidikan)

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
34	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	1.202.182.250	DAU	1.198.998.006	4 Kecamatan	5 unit (5 satuan pendidikan)
35	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	615.000.000	DAU	612.577.600	4 Kecamatan	5 unit (5 satuan pendidikan)
36	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	1.675.986.000	DAU	1.675.221.160	4 Kecamatan	satuan pendidikan
37	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	1.456.397.000	DAU	1.455.622.967	4 Kecamatan	satuan pendidikan
38	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	702.082.000	DAU	701.005.560	4 Kecamatan	satuan pendidikan
39	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	100.693.000	DAU	100.693.000	4 Kecamatan	satuan pendidikan
40	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	521.900.000	DAU	506.523.627	4 Kecamatan	50 orang (sanggar Pocut Meurah Inseun)
41	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	224.400.000	DAK Non Fisik	209.110.000	68 Gampong	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
42	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	694.508.119	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	689.100.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	118 orang
43	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	1.145.000.000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	1.145.000.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	1985 orang
44	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	60.000.000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	60.000.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	50 orang
45	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	12.500.000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	12.500.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	6 orang
46	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	1.120.000.000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	992.000.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	235 orang
47	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	1.470.151.931	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	1.468.351.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	326 orang
48	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	2.520.000.000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	2.520.000.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	1349 orang

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
49	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	30.000.000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	27.000.000	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Magat	15 orang
50	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	114.997.335	DAU	113.391.500	Kota Lhokseumawe	50 Sekolah
51	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	DAU	80.966.000	Kota Lhokseumawe	4 Kacamatan
52	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	DAU	23.066.100	Kota Lhokseumawe	100 Paket
53	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Program Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	110.000.000	DAU	109.031.500	Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Magat	60 Peserta didik
54	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanaan	500.000.000	DANA OTSUS	499.999.700	Kota Lhokseumawe	100 orang
55	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	20.000.000	DAU	19.999.700	Kota Lhokseumawe	10 orang

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
56	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000	DAU	29.350.600	Kota Lhokseumawe	72 orang
57	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.000.000	DAU Bidang Kesehatan	49.200.100	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	10 orag anak
58	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	30.000.000	DAU Bidang Kesehatan	29.831.680	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	13 orang
59	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	25.000.000	DAU Bidang Kesehatan	23.666.300	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 kecamatan
60	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	DAU Bidang Kesehatan	9.890.500	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
61	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15.000.000	DAU	14.563.500	Kota Lhokseumawe	4 kecamatan
62	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	DAU	-	Kota Lhokseumawe	4 kecamatan
63	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	105.000.000	DAU	104.975.000	Kota Lhokseumawe	34 orang
64	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	DAU	19.358.200	Kota Lhokseumawe	4 kecamatan
65	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	DAU	18.800.000	Kota Lhokseumawe	68 orang
66	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Perberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	DAU	19.953.900	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 kecamatan
67	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Perberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	228.000.000	DAU	24.664.400	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	5 lembaga

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
68	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Program Perberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU	27.908.385	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	50 keluarga
69	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.074.327.226	DAK Non Fisik dan DBH-PR	906.990.780	4 Kecamatan	4 Kecamatan
70	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.346.617.843	APBN/APB D/Masyara kat yang mandiri bayar premi	11.399.775.163	4 Kecamatan	4 Kecamatan
71	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.182.883.382	DOKA, DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan	.173.029.170	4 Kecamatan	4 Kecamatan
72	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91.220.000	DNF, DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan, BOK Dinas	90.650.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
73	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	109.800.000	DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan	62.253.800	4 Kecamatan	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
74	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	613.205.000	DAU, DNF,DBH-PR, BOK Dinas	560.204.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
75	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	229.299.600	DAK Non Fisik dan DBH-PR	135.537.041	4 Kecamatan	4 Kecamatan
76	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	795.045.200	DAK NON FISIK	520.530.000	7 PUSKESMAS	4 Kecamatan
77	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	19.700.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
78	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30.000.000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	29.836.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
79	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	192.700.000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	151.845.800	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
80	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	830.033.700	DAK Non Fisik dan DBH-PR	803.508.050	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
81	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	120.700.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan	120.593.600	4 Kecamatan	4 Kecamatan
82	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	210.896.420	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan	199.404.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
83	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	95.222.000	DanaTransf er Umum- DanaAlokas i Umum	58.372.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
84	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	250.876.320	DAK Non Fisik dan DBH-PR	220.682.300	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
85	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	11.845.200	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	REALISASI ANGGARAN (RP)	LOKASI (KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
86	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	40.000.000	DAU	39.958.600	4 Kecamatan	5 Layanan
87	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	15.000.000	DAU	14.390.400	4 Kecamatan	1 Laporan
88	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	85.000.000	DAU	84.999.600	4 Kecamatan	3 Dokumen
89	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	6.000.000	DAU	5.980.770	68 Desa	46800 Dokumen
90	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan	10.000.000	DAU	9.995.600	4 Kecamatan	12 Dokumen
TOTAL					86.803.073.394		83.476.674.300		



BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) TAHUN 2025

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2025

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah “***Meningkatkan Infrastruktur, Ekonomi Kota Lhokseumawe berkualitas dengan memperhatikan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan layanan publik melalui digitalisasi***”. Tema tersebut diharapkan mampu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan daerah dan sasaran pembangunan daerah, Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Aceh yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPK, serta isu strategis di tahun 2025, maka prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2025 yaitu:

1. Infrastruktur
2. Lingkungan Hidup
3. Reformasi Birokrasi
4. Kesehatan
5. Pendidikan
6. Pertumbuhan Ekonomi
7. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya

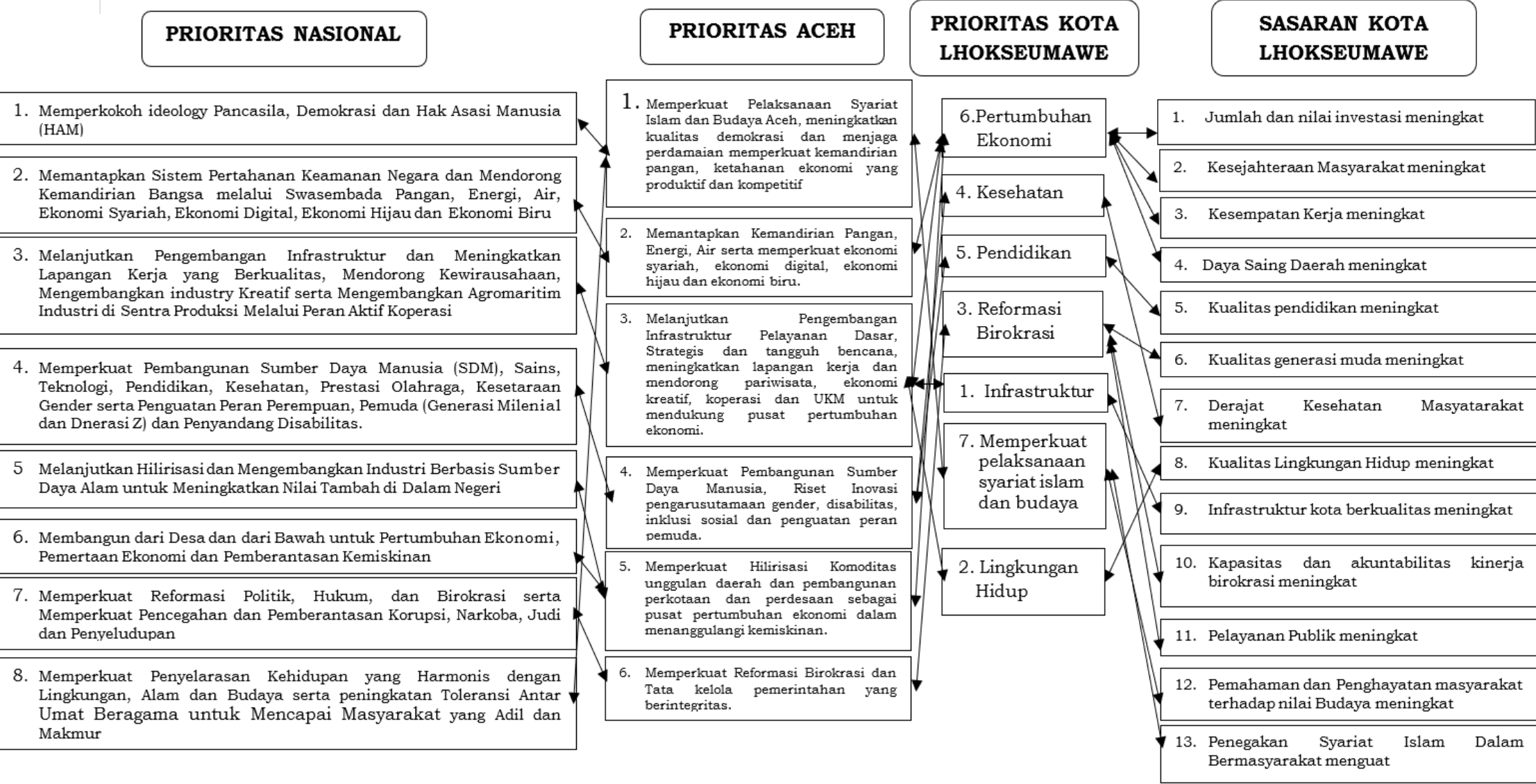
Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Selanjutnya sasaran daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. jumlah dan nilai investasi meningkat
2. kesejahteraan Masyarakat meningkat
3. kesempatan Kerja meningkat
4. daya Saing Daerah meningkat
5. kualitas pendidikan meningkat
6. kualitas generasi muda meningkat
7. derajat Kesehatan Masyarakat meningkat
8. kualitas lingkungan hidup meningkat
9. infrastruktur kota berkualitas meningkat
10. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat
11. pelayanan publik meningkat
12. pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya meningkat
13. penegakan syariat islam dalam bermasyarakat menguat

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe



Sumber: RKPK Kota Lhokseumawe 2025

Perumusan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan Tahun 2025, mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2023, Target RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 untuk Tahun 2025, Prioritas Nasional Tahun 2025 dan Prioritas Aceh Tahun 2025. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah.

Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting*). Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, Sasaran serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP dan WH
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan WH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
		Program Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AP2KB
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DP3AP2KB

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3AP2KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AP2KB
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan
		Program Pengelolaan Tanah kosong	Dinas Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan
		Program Pengurusan Hak Atas Tanah	Dinas Pertanahan
		Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	Dinas Pertanahan
		Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan	Dinas Pertanahan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Dinas Pertanahan
		Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Dinas Pertanahan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disdukcapil
		Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMG
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMG
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMG
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disporapar

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disporapar
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Disporapar
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dispursip
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dispursip
		Program Pengelolaan Arsip	Dispursip
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setdako
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setdako
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setdako
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setwan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Setwan
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPKD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banda Sakti
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banda Sakti
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banda Sakti
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banda Sakti
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banda Sakti
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Blang Mangat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Blang Mangat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Blang Mangat
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Blang Mangat
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Blang Mangat
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Blang Mangat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Muara Satu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Muara Satu
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muara Satu
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Muara Satu
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Muara Satu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Muara Dua
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Muara Dua

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muara Dua
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Muara Dua
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Muara Dua
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat MPD
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Sekretariat MPD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PK
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas PK
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas PK
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas PK
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas PK
Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DMPTSP dan Naker
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DMPTSP dan Naker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	DMPTSP dan Naker
		Program Hubungan Industrial	DMPTSP dan Naker
	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DMPTSP dan Naker
		Program Promosi Penanaman Modal	DMPTSP dan Naker
		Program Pelayanan Penanaman Modal	DMPTSP dan Naker
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DMPTSP dan Naker
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DMPTSP dan Naker
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DKPPP
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPPP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disperindagkop
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Disperindagkop
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Disperindagkop
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Disperindagkop
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Disperindagkop
		Program Pengembangan UMKM	Disperindagkop
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
		Program Pemasaran Pariwisata	Disporapar

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disporapar
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPPP
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
		Program Penyuluhan Petanian	DKPPP
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindagkop
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Disperindagkop
		Program Pengembangan Ekspor	Disperindagkop
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Disperindagkop
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindagkop
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperindagkop
Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	DP3AP2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3AP2KB

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AP2KB
Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Program Pendidikan Dayah	DSIPD
	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas PK
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas PK
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas PK
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat MAA
		Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Sekretariat MAA
	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat MPU
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Sekretariat MPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Baitul Mal
		Program Baitul Mal	Sekretariat Baitul Mal
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DSIPD
		Program Syariat Islam Aceh	DSIPD
Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		Program Kawasan Permukiman	Dinas PUPR
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUPR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	DLH

Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026, diolah

4.2. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

Rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 4.2 Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DOKA, DAU SG Pendidikan	168.500.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	2 Satuan Pendidikan
2	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAK Non Fisik	17.410.500.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	110 Satuan Pendidikan
3	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DAU SG Pendidikan, PAD	1.315.000.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)
4	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	DAU SG Pendidikan	15.000.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	110 Satuan Pendidikan
5	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DOKA, DAU SG Pendidikan	4.452.830.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	6 Satuan Pendidikan
6	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DOKA, PAD	1.000.000.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	2 Satuan Pendidikan
7	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DAK Non Fisik	9.649.090.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	25 Satuan Pendidikan

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DAU SG Pendidikan	10.000.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	25 Satuan Pendidikan
9	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DOKA	320.000.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	1 Satuan Pendidikan
10	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK Non Fisik	2.755.500.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	132 Satuan Pendidikan
11	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	DAK Non Fisik	576.290.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	3 Satuan Pendidikan
12	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DAU SG Pendidikan	150.900.000	4 Kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat)	50 Orang (Sanggar Pocut Meurah Inseun)
13	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAK Non Fisik dan DBH-PR	618.755.000	Kec. Muara Satu, Muara Dua, B. Sakti, Blang Mangat	4 Kecamatan
14	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBN/APBD/ Masyarakat yang mandiri bayar premi	50.000.000	Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Satu	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DOKA, DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan	121.220.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
16	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DNF, DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan, BOK Dinas	350.000.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
17	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan	212.000.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
18	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAU, DNF, DBH-PR, BOK Dinas	40.600.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
19	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DAK Non Fisik dan DBH-PR	40.000.000	Kec. Muara Satu, Muara Dua, B.Sakti, Blang Mangat	4 Kecamatan
20	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DAK NON FISIK	250.876.320	7 PUSKESMAS	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DAK Non Fisik dan DBH-PR	204.800.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
22	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DAK Non Fisik dan DBH-PR	946.233.700	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
23	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DAK Non Fisik dan DBH-PR	129.500.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
24	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DAK Non Fisik dan DBH-PR	25.000.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
25	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	75.000.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
26	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	1.937.091.305	4 Kecamatan	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum	80.850.000	4 Kecamatan	4 Kecamatan
28	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	DAK Non Fisik dan DBH-PR	730.000.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
29	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAK Non Fisik dan DBH-PR	782.580.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
30	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.376.617.843	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
31	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DBH-PR	20.000.000	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
32	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	APBK	958.879.847	Semua Kecamatan Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAK	5.444.026.000	Semua Kecamatan Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
34	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	APBK	5.469.944.245	Semua Kecamatan Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
35	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	APBD	50.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
36	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD	100.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe (Korban)
37	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD	40.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe (Korban)
38	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Peremberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	20.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Peremberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	DAU, FISKAL	462.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
40	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Peremberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	DAU, FISKAL	87.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
41	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	DOKA	500.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
42	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	FISKAL	79.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DAU Kesehatan	30.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
44	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DAU Kesehatan	50.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
45	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	DAU	30.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
46	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	DAU	15.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	DAU	10.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
48	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	DAU	15.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
49	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	DAU Kesehatan	30.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
50	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DAU	15.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
51	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DAU	15.000.000	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DAK NON FISIK-BOKB-KB	244.800.000	4 Kecamatan / 68 Desa	Tim Pendamping Keluarga (TPK)
53	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	P A D	80.000.000	Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Anak usia 0-17 Thn kurang 1 hari (Wajib KIA)
54	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	P A D	15.000.000	Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Penduduk Kota Lhokseumawe
55	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	P A D	40.000.000	Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Seluruh Masyarakat Kota Lhokseumawe

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	PAD dan DAU	25.000.000	Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Seluruh Masyarakat Kota Lhokseumawe
57	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	P A D	478.690.391	4 Kecamatan	Masyarakat
58	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	P A D	10.000.000	4 Kecamatan	Masyarakat
59	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	P A D	10.000.000	4 Kecamatan	Masyarakat
60	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DAU	25.000.000	4 Kecamatan / 68 Desa	Pemerintah Gampong
61	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DAU	71.000.000	4 Kecamatan / 68 Desa	Pemerintah Gampong
62	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DAU	10.000.000	4 Kecamatan / 68 Desa	Pemerintah Gampong

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DAU	22.760.000	4 Kecamatan / 68 Desa	Pemerintah Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong
64	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DAU	10.000.000	4 Kecamatan / 68 Desa	Pemerintah Gampong dan Masyarakat

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DAU	200.000.000	4 Kecamatan / 68 Desa	TP PKK Kota Lhokseumawe , TP PKK Kecamatan dan TP PKK Gampong
66	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DAU Bidang Pendidikan, DBH-CHT	515.000.000	Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat	Pencari Kerja
67	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DAU Bidang Pendidikan	10.000.000	Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangat	Lembaga Pelatihan

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	PAD	30.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
69	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	PAD	25.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
70	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	PAD	10.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
71	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU SG Pendidkan	454.439.626	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
72	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	PAD	20.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
73	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU	25.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PAD	20.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
75	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PAD	10.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
76	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	PAD	465.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
77	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	PAD	545.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
78	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	PAD	15.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe
79	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	PAD - DBH	30.000.000	Kota Lhokseumawe	Masyarakat Kota Lhokseumawe

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dana Bagi Hasil (DBH)	50.000.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 UMKH
81	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	1.305.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	680 orang 25 unit
82	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	2.200.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 Unit
83	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	550.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Orang
84	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	30.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang

NO	TUJUAN PROGRAM	NAMA SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER PEMBIAYAAN	PAGU MURNI	LOKASI (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	SASARAN PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	15.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 orang
86	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	108.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 orang
87	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	192.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135 orang
88	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	Baitul Mal	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	1.200.000.000	Kota Lhokseumawe , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 orang 36 unit 1 Ls
89	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Pendidikan Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	160.000.000	4 Kecamatan	Santri Dayah
TOTAL							80.462.274.277		



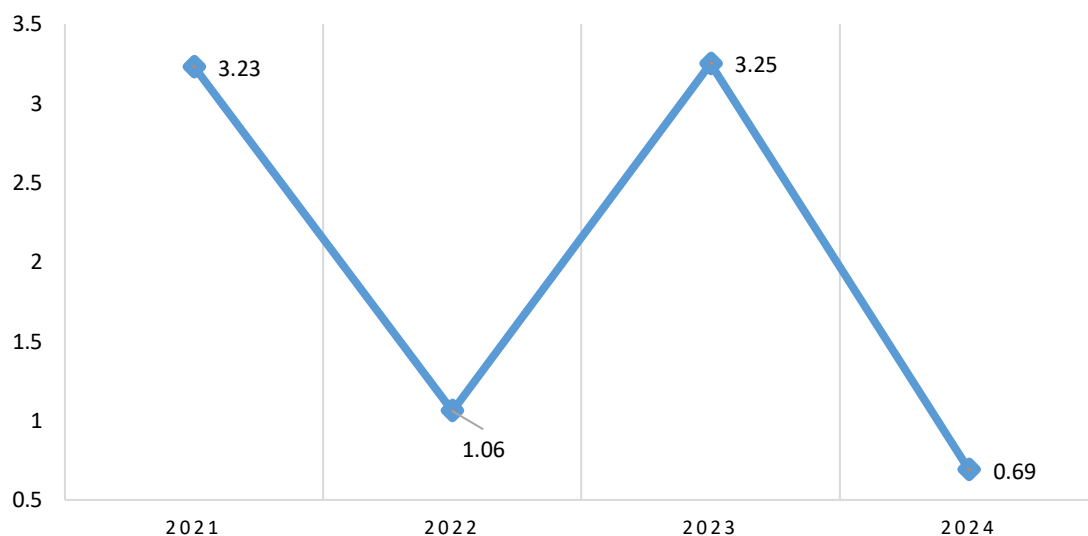
BAB V LOKASI PRIORITAS

BAB V

LOKASI PRIORITAS

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program lintas lembaga/lembaga serta keterlibatan partisipasi masyarakat khususnya di daerah yang menjadi lokasi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem untuk tujuan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan USD 1,9 per hari berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* (PPP)).

Gambar 5.1 Presentase Kemiskinan Ekstrem Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024



Pada Gambar 5.1 menunjukkan Tingkat kemiskinan ekstrem mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun 2021 ke tahun 2024. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe mencapai 3.23%, kemudian turun menjadi 1.06% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi

lokal, serta efektifitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.25%, dan kemudian turun menjadi 0.69% pada tahun 2024.

Berbagai isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin harus diselesaikan secara komprehensif dan terkonsolidasi bukan parsial. Berikut ini isu-isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe:

a. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, peningkatan keterampilan SDM dan penyerapan tenaga kerja.

b. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk perluasan akses layanan dengan prioritas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, untuk pencegahan stunting, dan balita gizi buruk.

c. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas dan angka partisipasi pendidikan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik dan kejar paket dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, pesisir dan terpencil.

d. Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman dengan memprioritaskan pada rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.

5.1. Hasil Analisis Penentuan Lokasi Prioritas

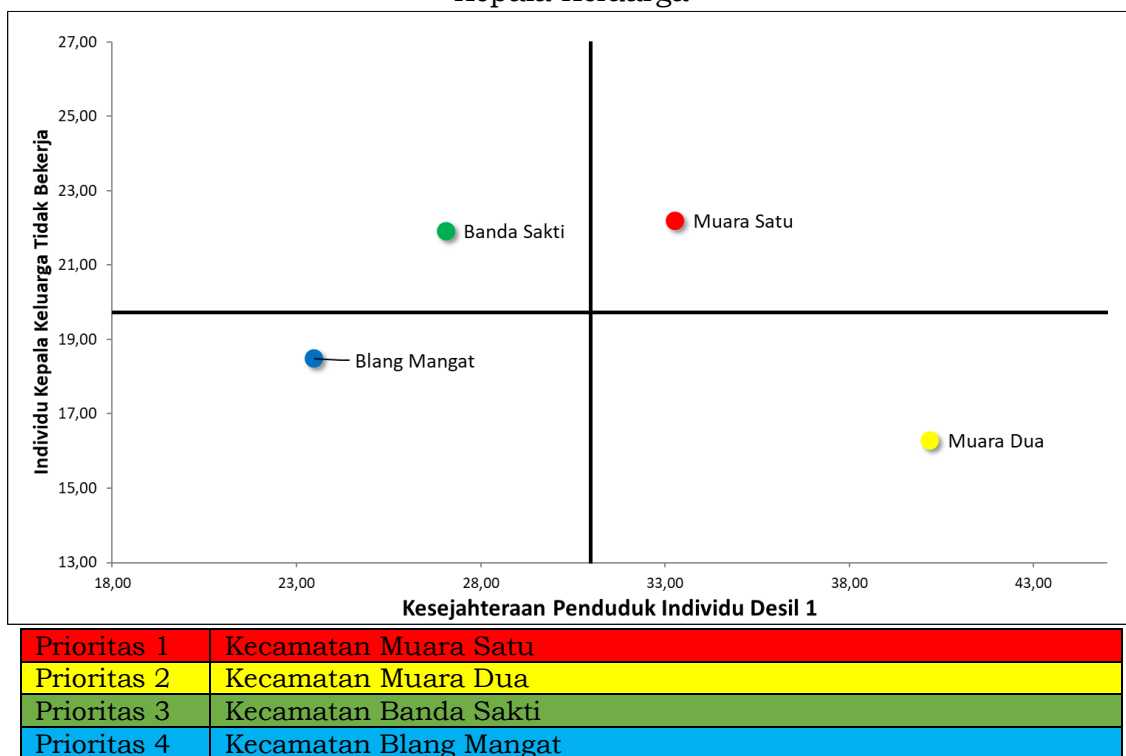
5.1.1. Kuadran Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Pada tahun 2023, Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe berjumlah 60.116 jiwa. Hal ini menurun sebanyak 38.837 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2022 (BPS).

Masalah pengangguran menjadi lebih serius ketika status pengangguran tersebut disandang oleh kepala keluarga. Kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan kebutuhan finansial dan dasar bagi keluarganya. Ketidakadaan pekerjaan bagi kepala keluarga berdampak signifikan pada kesejahteraan anggota rumah tangga. Berdasarkan data P3KE tahun 2021-2023, masih banyak penduduk pada desil 1 yang belum atau tidak bekerja. Total jumlah penduduk Desil 1 adalah 23.154 jiwa, dan yang belum atau tidak bekerja sebesar 16,46%, lebih tepatnya 3.812 jiwa. Pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh Penduduk Desil 1 adalah sebagai Pekerja Lepas, yaitu sebanyak 2.372 jiwa.

Pada **Gambar 5.2** mengidentifikasi wilayah prioritas untuk mengatasi pengangguran di kalangan kepala keluarga di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap individu kepala keluarga tidak bekerja. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu sebesar 22,20 persen, pada Kuadran II di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Dua sebesar 21,92 persen, pada kuadran III di Desil 1 yaitu Kecamatan Banda Sakti sebesar 18,49 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1 yaitu Blang Mangat sebesar 16,29 persen.

Gambar 5.2 Lokasi Prioritas Program Pengurangan Jumlah Pengangguran Kepala Keluarga

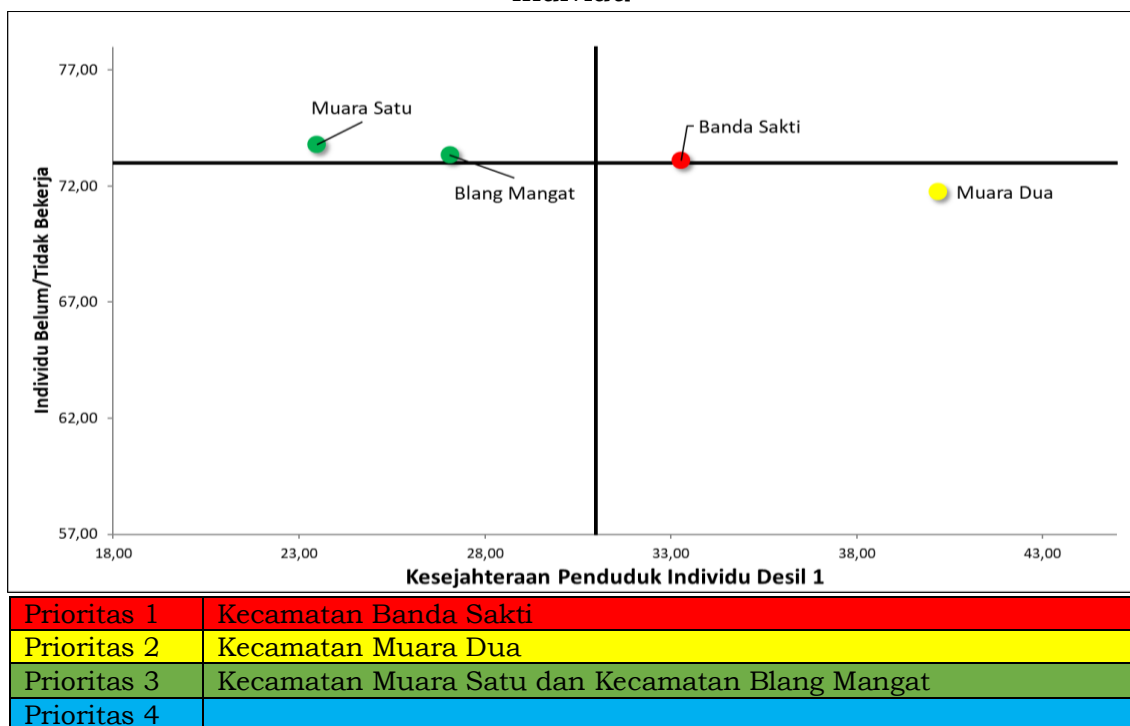


Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data penganggurn di tingkat nasional maupun provinsi Aceh. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari 2019 hingga tahun 2021 yaitu masing-masing sebesar 11,01 persen; 11,99 persen; dan 11,16 persen. Pada tahun 2022 TPT di Kota Lhokseumawe turun menjadi 9,15 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 8,68 persen, akan tetapi penurunan tersebut masih menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Aceh.

Pada Gambar 5.3 mengidentifikasi wilayah prioritas untuk mengatasi pengangguran di kalangan Individu di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap individu belum/tidak bekerja. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Banda Sakti sebesar 73,79 persen, pada Kuadran II di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Dua sebesar 73,34 persen,

pada kuadran III di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu dan Blang Mangat dengan masing-masing sebesar 73,10 persen dan 71,77 persen.

Gambar 5.3 Lokasi Prioritas Program Pengurangan Jumlah Pengangguran Individu



5.1.2. Kuadran Wilayah Bidang Kesehatan

Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPK Lhokseumawe 2023- 2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Semester II tahun 2023, serta isu strategis nasional dan daerah tentang kemiskinan ekstrim, stunting dan penanganan inflasi.

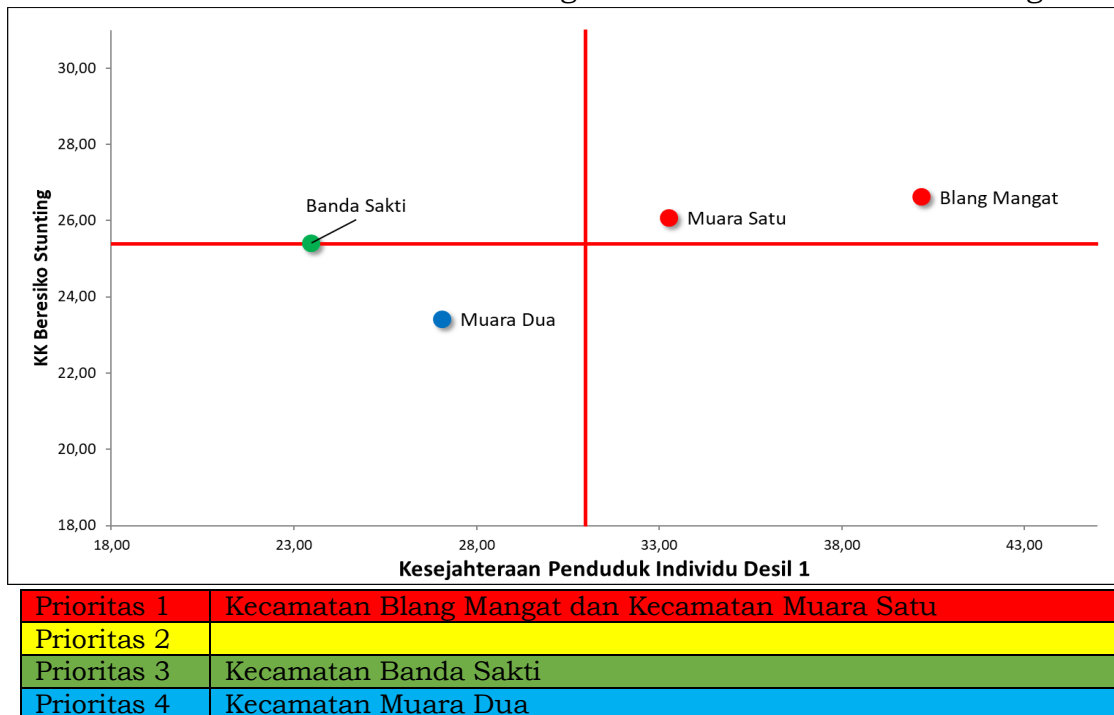
Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Prevelensi Stunting Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019 Stunting Kota Lhokseumawe mencapai 35,40 persen, sedangkan Aceh sebesar 34.18 lebih tinggi diatas Nasional sebesar 27,70 persen. Prevelensi Stunting Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27,40 persen dan meningkat 0.7 persen pada tahun 2023 menjadi 20,70 persen dan Aceh mengalami penurunan menjadi 29,40 persen yang lebih rendah dari nasional sebesar 21,5 persen.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menurunkan angka prevalensi Stunting Kota Lhokseumawe dengan peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan dan dengan melakukan inovasi yang diluncurkan BKKBN salah satunya program Bapak asuh anak stunting yang melibatkan seluruh masyarakat, Forkopinda, institusi, perusahaan dan staekholder dalam memberikan bantuan untuk penanganan stunting.

Gambar 5.4 Lokasi Prioritas Program Penurunan Resiko Stunting



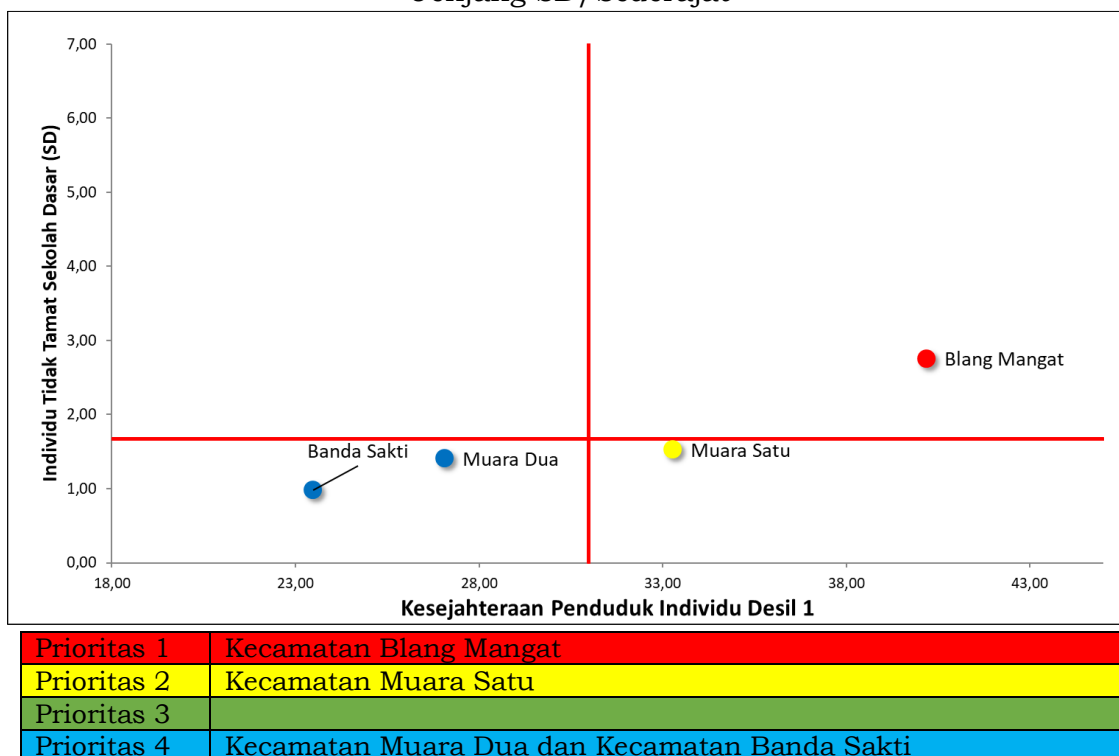
Pada **Gambar 5.4** mengidentifikasi wilayah prioritas untuk menurunkan resiko stunting di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap keluarga beresiko stunting. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu masing-masing sebesar 26,62 persen dan 26,08 persen, pada Kuadran III di Desil 1 yaitu Kecamatan Banda Sakti sebesar 25,41 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Dua sebesar 23,34 persen.

5.1.3. Kuadran Wilayah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan mulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mendapatkan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikator untuk mengetahui jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

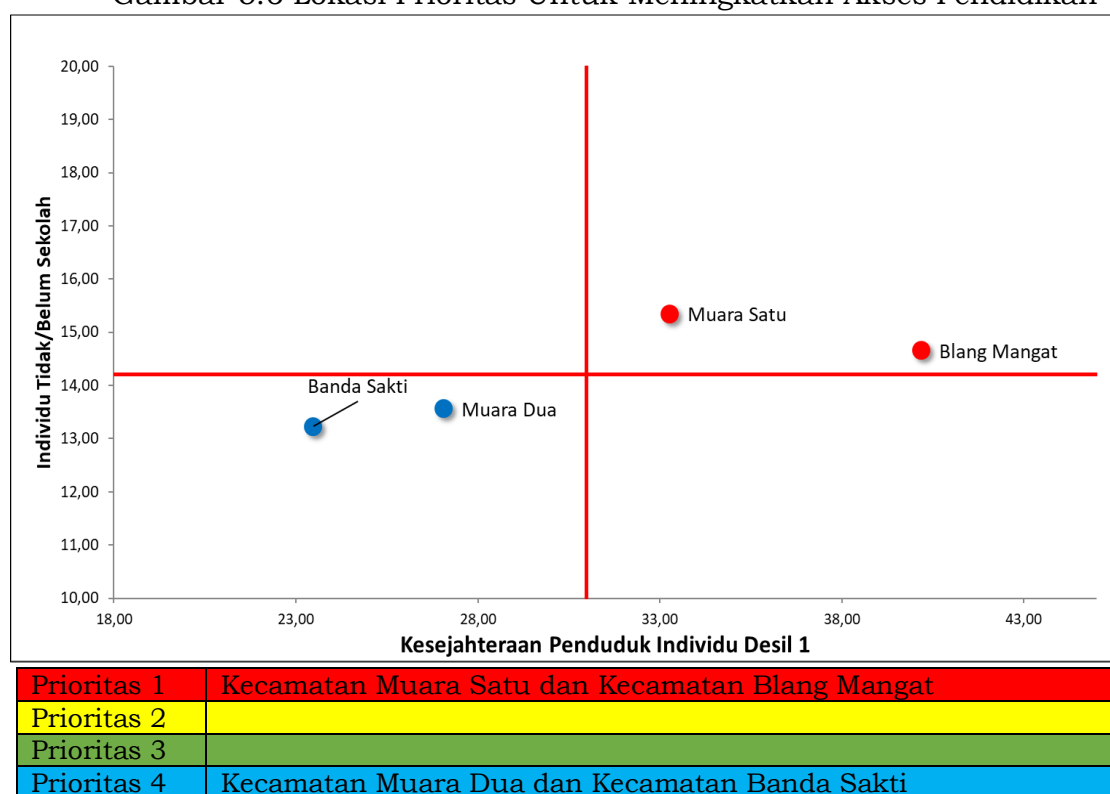
Pendidikan jenjang SD (Sekolah Dasar) adalah tingkat pendidikan dasar yang wajib ditempuh oleh anak-anak usia 7-12 tahun. Pendidikan SD membangun dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau berpartisipasi dalam masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya, akses pendidikan, menyediakan sumber daya yang memadai, seperti tenaga pendidik yang berkualitas dan fasilitas pendukung yang memadai.

Gambar 5.5 Lokasi Prioritas Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Jenjang SD/Sederajat



Pada Gambar 5.5 mengidentifikasi wilayah prioritas untuk akses Pendidikan Jenjang SD/Sederajat di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap jumlah individu yang tidak tamat SD/Sederajat. Penetapan prioritas pada wilayah-wilayah ini adalah langkah penting dalam merancang strategi efektif untuk meningkatkan akses pendidikan SD/Sederajat di Kota Lhokseumawe, khususnya bagi keluarga miskin. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Blang Mangat sebesar 2,76 persen, Pada Kuadran II di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu sebesar 1,41 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti masing-masing sebesar 1,53 persen dan 0,98 persen.

Gambar 5.6 Lokasi Prioritas Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan

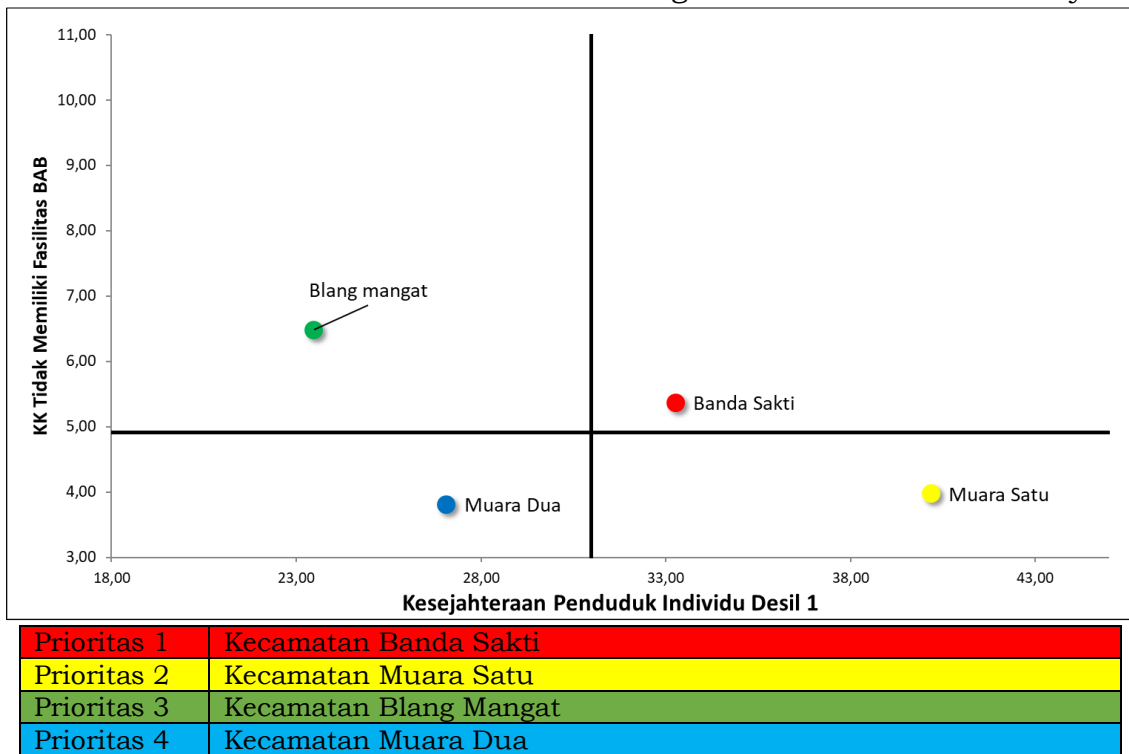


Pada Gambar 5.6 mengidentifikasi wilayah prioritas untuk akses pendidikan di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap jumlah individu tidak/belum bersekolah. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat masing-masing sebesar 15,35 persen dan 14,66 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti masing-masing sebesar 13,57 persen dan 13,23 persen.

5.1.4. Kuadran Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

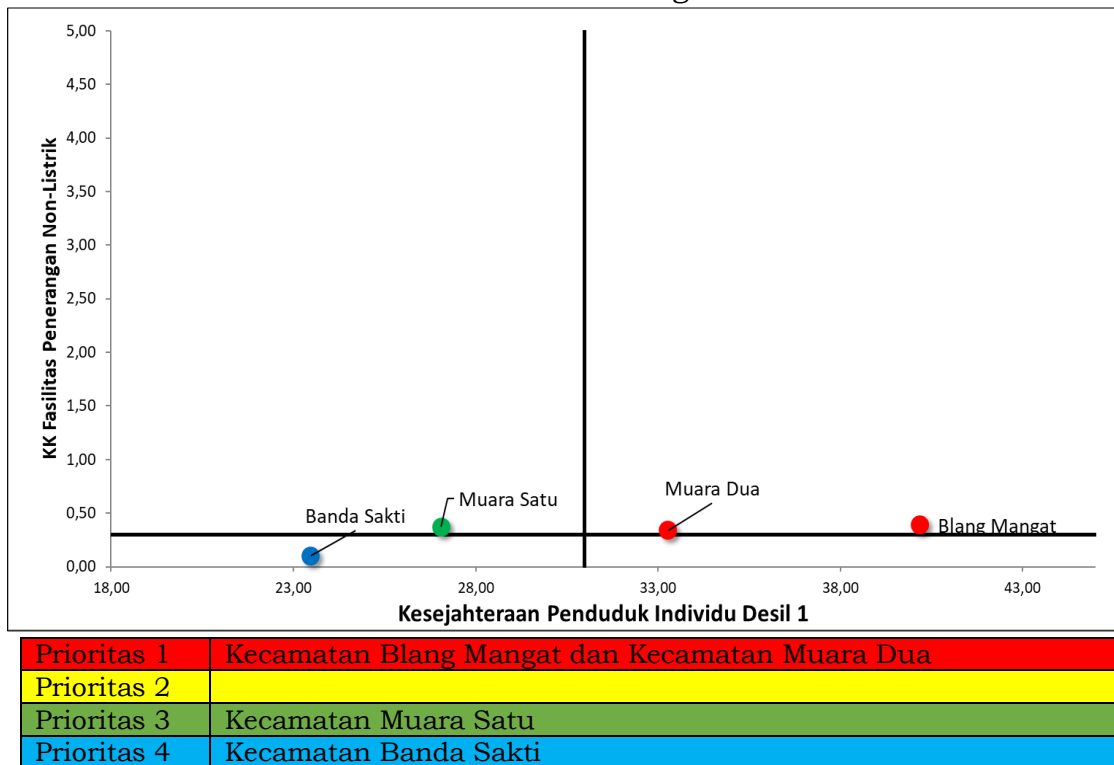
Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan sanitasi, perbaikan fasilitas penerangan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup Masyarakat.

Gambar 5.7 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Sanitasi Layak



Pada Gambar 5.7 mengidentifikasi wilayah pelaksanaan program perbaikan sanitasi layak di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap keluarga yang tidak memiliki fasilitas BAB. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Banda Sakti sebesar 6,48 persen, pada Kuadran II di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu sebesar 5,37 persen, pada kuadran III di Desil 1 yaitu Kecamatan Blang Mangat sebesar 3,98 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1 yaitu Muara Dua sebesar 3,81 persen. Kecamatan Banda Sakti menjadi prioritas utama di masa depan dalam Pembangunan fasilitas BAB.

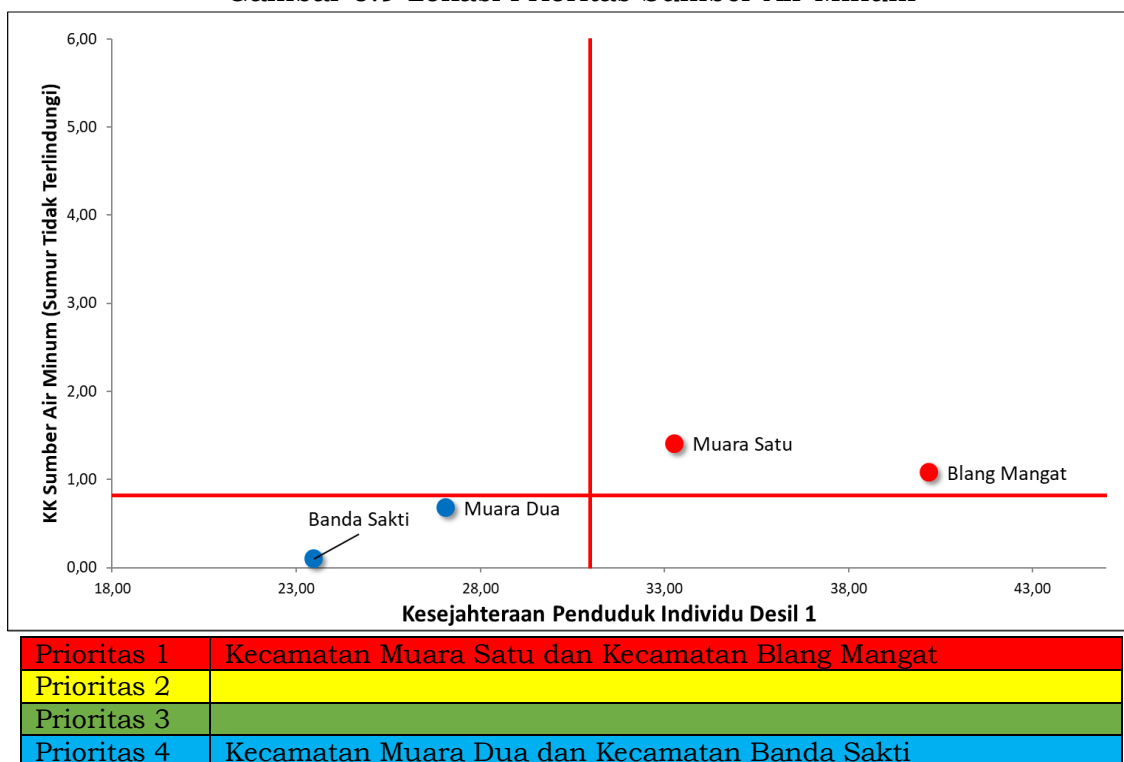
Gambar 5.8 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Pemerataan Akses Listrik



Kondisi kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitas wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan Listrik.

Pada **Gambar 5.8** mengidentifikasi wilayah pelaksanaan program Pemerataan Listrik di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap keluarga dengan Penerangan Non-Listrik. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua masing-masing sebesar 0,39 persen dan 0,37 persen, pada kuadran III di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu sebesar 0,34 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1 yaitu Kecamatan Banda sakti sebesar 0,10 persen. Dengan mengidentifikasi prioritas ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemerataan akses listrik, khususnya dalam hal penerangan bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah yaitu Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara.

Gambar 5.9 Lokasi Prioritas Sumber Air Minum

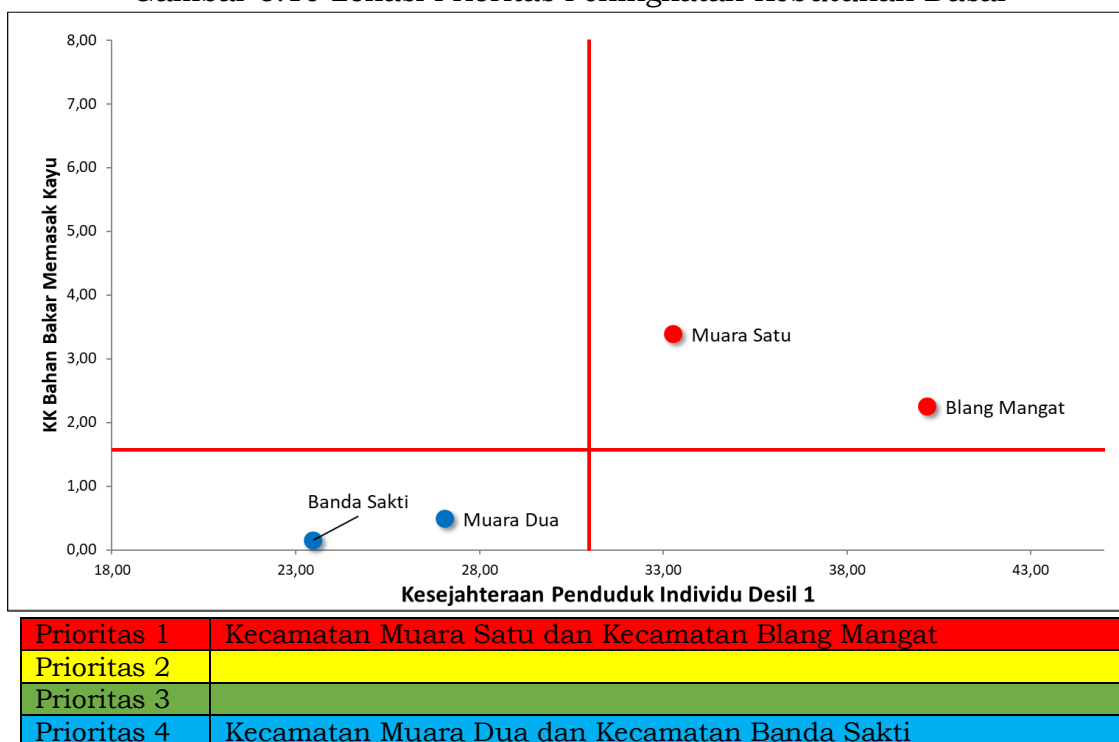


Air merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari. Perbandingan kebutuhan air secara internasional menunjukkan kebutuhan konsumsi air secara normal per orang sekitar 20 liter per hari dengan perincian 4 liter untuk konsumsi dan sisanya untuk aktivitas yang lainnya. Program yang mendukung pemenuhan infrastruktur dasar adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

Pada Gambar 5.9 mengidentifikasi wilayah pelaksanaan Lokasi sumberair minum di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap keluarga dengan Sumber Air Minum. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat masing-masing sebesar 1,41 persen dan 1,08 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1

yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda sakti masing-masing sebesar 0,68 persen dan 0,10 persen. Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat yang menjadi prioritas pembangunan sumber air minum, dimana mereka masih mengandalkan air sumur tidak terlindungi sebagai sumber utama air minum yang dapat menimbulkan resiko Kesehatan.

Gambar 5.10 Lokasi Prioritas Peningkatan Kebutuhan Dasar



Pada Gambar 5.8 mengidentifikasi wilayah pelaksanaan program Peningkatan Kebutuhan Dasar yaitu memasak masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar di Kota Lhokseumawe dengan memperlihatkan Kuadran Prioritas berdasarkan presentase individu Desil 1 terhadap keluarga dengan Keluarga dengan Bahan Bakar Memasak Kayu. Pada Kuadran I di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat masing-masing sebesar 3,39 persen dan 2,25 persen, dan pada kuadran IV di Desil 1 yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda sakti masing-masing sebesar 0,49 persen dan 0,15 persen.



BAB VI PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menciptakan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang efektif dan optimal demi mencapai sasaran dalam percepatan pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Penyusunan RAT merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Lhokseumawe Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2025 dan diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan, oleh karena itu Rencana Aksi Tahunan (RAT) perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah.

Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemisi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa dan dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.



BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2025